



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA



# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024

**#** bangga  
melayani  
bangsa

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Contact Us  
**(021) 22859672**

More Information  
**[www.ptun-jakarta.go.id](http://www.ptun-jakarta.go.id)**

Our Office  
**Jl. A. Sentra Primer Baru Timur,  
Pulo Gebang, Jakarta Timur. 13950**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya kepada Keluarga Besar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sehingga dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisiensi dan efektif maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan. Laporan ini dibuat berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 4506/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024 ini merupakan laporan sebagai bentuk pertanggung jawaban dan diharapkan juga merupakan bahan evaluasi serta perencanaan untuk penyusunan program kerja selanjutnya untuk lebih baik lagi agar dapat mewujudkan visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sudah ditetapkan yaitu **"Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang Agung"**.

Semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini dapat bermanfaat. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kualitas dan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Jakarta, 20 Januari 2025



Genoeti Pratiwi, SH, MH  
Nip. 197210261992032001

## OUTLINE LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>BAB II</b>	<b>A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA</b>	<b>4</b>
	1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	4
	2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	4
	3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	4
	4. Keadaan Perkara Tingkat PK	4
	<b>B. PENYELESAIAN PERKARA</b>	<b>5</b>
	1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus	5
	2. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu	5
	3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK	11
	<b>C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU ( Sertifikasi ISO Pengadilan )</b>	<b>14</b>
	1. POSBAKUM	14
	2. Perkara Prodeo	15
<b>BAB III</b>	<b>SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>16</b>
	Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/Golongan/ Pendidikan	
	1. Mutasi	26
	2. Promosi	29
	3. Pensiun	30
	4. Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	30
<b>BAB IV</b>	<b>PENGELOLA KEUANGAN, SARANA PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI</b>	<b>38</b>
	1. Pengelolaan Keuangan	38
	2. Pengelolaan Saran dan Prasarana	40
	3. Pengelolaan Teknologi Informasi	53
	- Implementasi E Court	53
	- Implementasi SIPP	55

<b>BAB V</b>	<b>PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>56</b>
	1. Akreditasi Penjaminan Mutu	56
	2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	61
	3. Inovasi Pelayanan Publik	70
<b>BAB VI</b>	<b>PENGAWASAN</b>	<b>91</b>
	A. Internal	91
	B. Evaluasi	96
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>97</b>
	A. Kesimpulan	97
	B. Rekomendasi	99

## BAB I PENDAHULUAN

### **Kebijakan Umum Peradilan**

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI, Sebagai salah satu institusi negara / pemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membuat Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2024.

### **Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**

Sebagaimana halnya Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan Tertinggi dan PTUN dalam struktur organisasi berada di bawah naungan Mahkamah Agung, maka PTUN Jakarta memiliki **visi** dan **misi** yang sama dengan organisasi induknya, yaitu:

***“MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
YANG AGUNG”***

## **MISI**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan, dan Modern;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Rencana Strategis**

Perencanaan strategis dapat diartikan sebagai suatu pengarahan serta pemikiran untuk mencapai visi dan misi. Pengadilan TUN Jakarta melalui kebijakan yang dibuat oleh unsur pimpinan (Ketua/Wakil Ketua/Para Hakim dan Panitera / Sekretaris) beserta jajarannya kebawah telah menyusun rencana strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini antara lain :
  - a. Persentase perkara yang diselesaikan ;
  - b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi ;
  - c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

2. Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;  
Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini antara lain :
  - Persentase salinan Putusan Yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
  - a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
  - b. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;  
Indikator / Kinerja yang mendukung sasaran ini adalah :
  - Persentase Putusan Perkara Tata Usaha Negara (TUN) yang ditindak lanjuti.

Dari rencana strategis tersebut, diharapkan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas teknis yudisial maupun non yudisial dapat dilakukan dengan baik serta dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), sehingga hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan dapat diminimalisir. Terlebih lagi dengan dibentuknya Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) dapat memperkuat pelaksanaan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

## BAB II

### KEADAAN PERKARA

#### A. Keadaan Perkara di Pengadilan TUN Jakarta

##### 1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pada akhir tahun 2023 PTUN Jakarta mempunyai sisa perkara sebanyak **194** Perkara, dan pada tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerima perkara masuk **484** Perkara, perkara yang dicabut **107** perkara, perkara yang di putus **386** perkara, Dismissal **35** perkara, Perlawanan **10** perkara, dan sisa perkara **158** perkara.

##### 2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Sisa Perkara Banding pada tahun 2023 sebanyak **252** Perkara, dan pada tahun 2024 PTUN Jakarta menerima perkara banding yang sebanyak **267** Perkara, perkara banding dicabut **1** perkara, perkara yang diputus **460** Perkara, sisa perkara banding **58** perkara.

##### - Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Sisa Perkara Kasasi pada tahun 2023 sebanyak **125** perkara pada tahun 2024 PTUN Jakarta menerima perkara Kasasi masuk sebanyak **430** perkara, perkara Putus **195** perkara, sisa perkara **360** perkara.

##### - Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali ( PK )

Jumlah Perkara Kasasi di Tahun 2024 sejumlah **555** Perkara, dikurangi Perkara Permohonan PK sebanyak **65** Perkara, jadi perkara yang tidak mengajukan hukum PK sebanyak **490** Perkara.

## B. Penyelesaian Perkara

### 1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus

NO.	Jenis Perkara	Sisa Perkara
<b>A</b>	<b>GUGATAN</b>	
1	Pertanahan	19
2	Kepegawaian	1
3	Perijinan	28
4	Lingkungan Hidup	2
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	0
6	Badan Hukum/ Parpol	27
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	0
8	Kepala Daerah	0
9	Proses Pemilihan Umum	0
10	Penggantian Antar Waktu	0
11	Ketenagakerjaan	0
12	Sengketa Informasi Publik/KIP	7
13	Pengadaan Tanah	0
14	Fiktif Positif	0
15	Penyalahgunaan Wewenang	0
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	30
17	Merek	1
18	Lain Lain	43
	<b>JUMLAH</b>	<b>158</b>

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2024 terdapat **158** Perkara, sisa dari jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak **684** Perkara Rincian dari jenis sisa perkara adalah sebagai berikut :

### 2. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu

Dari perkara-perkara yang telah diselesaikan selama tahun 2024 sebanyak **529** Perkara, Perkara yang Putus Kurang dari 3 ( Tiga ) Bulan sejumlah **174** Perkara, Perkara yang putus 3 ( Tiga ) sampai dengan 5 ( Lima ) bulan sejumlah **207** Perkara, dan Perkara putus 5 ( Lima ) sampai dengan 12 ( Dua Belas ) Bulan sejumlah **148** Perkara.

NO	PERKARA PUTUS TAHUN 2023		
	KURANG DARI 3 BULAN	3 - 5 BULAN	5 - 12 BULAN
1.	645/G/2023/PTUN.JKT	485/G/TF/2023/PTUN.JKT	365/G/2023/PTUN.JKT
2.	588/G/2023/PTUN.JKT	400/G/TF/2023/PTUN.JKT	368/G/2023/PTUN.JKT
3.	661/G/2023/PTUN.JKT	374/G/2023/PTUN.JKT	369/G/2023/PTUN.JKT
4.	664/G/2023/PTUN.JKT	418/G/TF/2023/PTUN.JKT	346/G/2023/PTUN.JKT
5.	669/G/2023/PTUN.JKT	4588/G/TF/2023/PTUN.JKT	342/G/2023/PTUN.JKT
6.	477/G/2023/PTUN.JKT	490/G/TF/2023/PTUN.JKT	381/G/2023/PTUN.JKT
7.	662/G/2023/PTUN.JKT	380/G/2022/PTUN.JKT	373/G/2023/PTUN.JKT
8.	552/G/TF/2023/PTUN.JKT	457/G/2023/PTUN.JKT	382/G/2023/PTUN.JKT
9.	491/G/KI/2023/PTUN.JKT	416/G/2023/PTUN.JKT	440/G/2023/PTUN.JKT
10.	594/PLW/2023/PTUN.JKT	513/G/2023/PTUN.JKT	461/G/2023/PTUN.JKT
11.	609/G/2023/PTUN.JKT	402/G/2023/PTUN.JKT	460/G/2023/PTUN.JKT
12.	4/G/2024/PTUN.JKT	417/G/TF/2023/PTUN.JKT	436/G/2023/PTUN.JKT
13.	13/G/2024/PTUN.JKT	483/G/2023/PTUN.JKT	344/G/2023/PTUN.JKT
14.	569/G/TF/2023/PTUN.JKT	514/G/2023/PTUN.JKT	437/G/2022/PTUN.JKT
15.	572/G/TF/2023/PTUN.JKT	115/G/TF/2023/PTUN.JKT	438/G/2023/PTUN.JKT
16.	605/G/2023/PTUN.JKT	120/G/TF/2023/PTUN.JKT	465/G/2023/PTUN.JKT
17.	597/G/2023/PTUN.JKT	502/G/TF/2023/PTUN.JKT	467/G/2023/PTUN.JKT
18.	7/G/2024/PTUN.JKT	478/G/2023/PTUN.JKT	420/G/2023/PTUN.JKT
19.	25/G/2024/PTUN.JKT	479/G/2023/PTUN.JKT	421/G/2023/PTUN.JKT
20.	631/G/2023/PTUN.JKT	480/G/2023/PTUN.JKT	451/G/2023/PTUN.JKT
21.	641/PLW/2023/PTUN.JKT	462/G/2023/PTUN.JKT	475/G/2023/PTUN.JKT
22.	18/G/2024/PTUN.JKT	469/G/2023/PTUN.JKT	454/G/2023/PTUN.JKT
23.	623/G/TF/2023/PTUN.JKT	482/G/TF/2023/PTUN.JKT	466/G/2023/PTUN.JKT
24.	31/G/2024/PTUN.JKT	507/G/TF/2023/PTUN.JKT	489/G/2023/PTUN.JKT
25.	660/G/TF/2023/PTUN.JKT	470/G/2023/PTUN.JKT	497/G/2023/PTUN.JKT
26.	648/PLW/2023/PTUN.JKT	498/G/2023/PTUN.JKT	516/G/2023/PTUN.JKT
27.	647/PLW/2023/PTUN.JKT	549/G/TF/2023/PTUN.JKT	528/G/2023/PTUN.JKT
28.	622/G/TF/2023/PTUN.JKT	481/G/TF/2023/PTUN.JKT	529/G/2023/PTUN.JKT
29.	11/G/TF/2024/PTUN.JKT	508/G/2023/PTUN.JKT	543/G/2023/PTUN.JKT
30.	29/G/2024/PTUN.JKT	510/G/2023/PTUN.JKT	532/G/2023/PTUN.JKT
31.	39/G/2024/PTUN.JKT	560/G/2023/PTUN.JKT	493/G/2023/PTUN.JKT
32.	64/G/2024/PTUN.JKT	561/G/2023/PTUN.JKT	521/G/2023/PTUN.JKT
33.	41/G/2024/PTUN.JKT	596/G/TF/2023/PTUN.JKT	522/G/2023/PTUN.JKT
34.	56/G/2024/PTUN.JKT	501/G/2023/PTUN.JKT	556/G/2023/PTUN.JKT
35.	57/G/2024/PTUN.JKT	541/G/KI/2023/PTUN.JKT	579/G/2023/PTUN.JKT
36.	58/G/2024/PTUN.JKT	494/G/2023/PTUN.JKT	545/G/2023/PTUN.JKT
37.	60/G/2024/PTUN.JKT	495/G/2023/PTUN.JKT	511/G/2023/PTUN.JKT
38.	485/G/2023/PTUN.JKT	565/G/2023/PTUN.JKT	523/G/2023/PTUN.JKT
39.	63/G/2024/PTUN.JKT	519/G/2023/PTUN.JKT	544/G/TF/2023/PTUN.JKT

40.	656/G/2023/PTUN.JKT	520/G/2023/PTUN.JKT	548/G/2023/PTUN.JKT
41.	30/G/2024/PTUN.JKT	537/G/TF/2023/PTUN.JKT	563/G/2023/PTUN.JKT
42.	42/G/2024/PTUN.JKT	577/G/TF/2023/PTUN.JKT	557/G/2023/PTUN.JKT
43.	51/G/2024/PTUN.JKT	593/G/2023/PTUN.JKT	559/G/2023/PTUN.JKT
44.	100/G/2024/PTUN.JKT	595/G/TF/2023/PTUN.JKT	562/G/2023/PTUN.JKT
45.	651/PLW/2023/PTUN.JKT	606/G/TF/2023/PTUN.JKT	598/G/2023/PTUN.JKT
46.	61/G/TF/2024/PTUN.JKT	471/G/TF/2023/PTUN.JKT	574/G/2023/PTUN.JKT
47.	115/G/2024/PTUN.JKT	472/G/TF/2023/PTUN.JKT	580/G/2023/PTUN.JKT
48.	23/PLW/2024/PTUN.JKT	473/G/TF/2023/PTUN.JKT	603/G/2022/PTUN.JKT
49.	14/G/2024/PTUN.JKT	492/G/2023/PTUN.JKT	612/G/2023/PTUN.JKT
50.	65/G/2024/PTUN.JKT	503/G/2023/PTUN.JKT	531/G/2023/PTUN.JKT
51.	66/G/2024/PTUN.JKT	515/G/2023/PTUN.JKT	567/G/2023/PTUN.JKT
52.	60/PLW/2024/PTUN.JKT	517/G/2023/PTUN.JKT	617/G/2023/PTUN.JKT
53.	126/G/2024/PTUN.JKT	524/G/2023/PTUN.JKT	624/G/2023/PTUN.JKT
54.	118/G/2024/PTUN.JKT	518/G/2023/PTUN.JKT	625/G/2023/PTUN.JKT
55.	62/G/TF/2024/PTUN.JKT	497/G/2023/PTUN.JKT	627/G/2023/PTUN.JKT
56.	94/G/TF/2024/PTUN.JKT	536/G/2023/PTUN.JKT	642/G/2023/PTUN.JKT
57.	98/G/TF/2024/PTUN.JKT	539/G/2023/PTUN.JKT	620/G/2023/PTUN.JKT
58.	146/G/2024/PTUN.JKT	586/G/TF/2023/PTUN.JKT	581/G/2023/PTUN.JKT
59.	327/G/2024/PTUN.JKT	547/G/2023/PTUN.JKT	602/G/2023/PTUN.JKT
60.	147/G/2024/PTUN.JKT	590/G/TF/2023/PTUN.JKT	576/G/2023/PTUN.JKT
61.	78/G/2024/PTUN.JKT	535/G/2023/PTUN.JKT	638/G/TF/2023/PTUN.JKT
62.	56/PLW/2024/PTUN.JKT	550/G/TF/2023/PTUN.JKT	668/G/2023/PTUN.JKT
63.	77/G/TF/2024/PTUN.JKT	591/G/2023/PTUN.JKT	610/G/2023/PTUN.JKT
64.	89/G/2024/PTUN.JKT	540/G/2023/PTUN.JKT	626/G/2023/PTUN.JKT
65.	137/G/2024/PTUN.JKT	607/G/TF/2023/PTUN.JKT	642/G/2023/PTUN.JKT
66.	139/G/2024/PTUN.JKT	534/G/2023/PTUN.JKT	1/G/2024/PTUN.JKT
67.	144/G/2024/PTUN.JKT	553/G/TF/2023/PTUN.JKT	5/G/2024/PTUN.JKT
68.	145/G/2024/PTUN.JKT	582/G/2023/PTUN.JKT	8/G/2024/PTUN.JKT
69.	156/G/2024/PTUN.JKT	575/G/2023/PTUN.JKT	573/G/TF/2023/PTUN.JKT
70.	157/G/2024/PTUN.JKT	634/G/TF/2023/PTUN.JKT	630/G/2023/PTUN.JKT
71.	164/G/2024/PTUN.JKT	635/G/TF/2023/PTUN.JKT	649/G/2023/PTUN.JKT
72.	172/G/2024/PTUN.JKT	636/G/TF/2022/PTUN.JKT	614/G/2023/PTUN.JKT
73.	173/G/2024/PTUN.JKT	558/G/TF/2022/PTUN.JKT	615/G/2023/PTUN.JKT
74.	152/G/2024/PTUN.JKT	554/G/TF/2022/PTUN.JKT	655/G/2023/PTUN.JKT
75.	159/G/2024/PTUN.JKT	555/G/TF/2022/PTUN.JKT	6/G/2024/PTUN.JKT
76.	160/G/2024/PTUN.JKT	568/G/TF/2022/PTUN.JKT	643/G/2023/PTUN.JKT
77.	184/G/2024/PTUN.JKT	599/G/TF/2023/PTUN.JKT	640/G/2023/PTUN.JKT
78.	187/G/2024/PTUN.JKT	613/G/TF/2023/PTUN.JKT	19/G/2024/PTUN.JKT
79.	191/G/2024/PTUN.JKT	619/G/TF/2023/PTUN.JKT	9/G/2024/PTUN.JKT
80.	192/G/TF/2024/PTUN.JKT	83/G/TF/2023/PTUN.JKT	654/G/2023/PTUN.JKT
81.	198/G/2024/PTUN.JKT	629/G/TF/2023/PTUN.JKT	608/G/2023/PTUN.JKT
82.	153/G/2024/PTUN.JKT	570/G/2023/PTUN.JKT	632/G/2023/PTUN.JKT

83	169/G/2024/PTUN.JKT	571/G/TF/2023/PTUN.JKT	584/G/2023/PTUN.JKT
84	195/G/2024/PTUN.JKT	618/G/2023/PTUN.JKT	616/G/2023/PTUN.JKT
85	205/G/2024/PTUN.JKT	644/G/TF/2023/PTUN.JKT	633/G/2023/PTUN.JKT
86	206/G/2024/PTUN.JKT	621/G/2023/PTUN.JKT	659/G/2023/PTUN.JKT
87	174/G/2024/PTUN.JKT	628/G/TF/2023/PTUN.JKT	45/G/2024/PTUN.JKT
88	212/G/2024/PTUN.JKT	658/G/2023/PTUN.JKT	34/G/2024/PTUN.JKT
89	193/G/TF/2024/PTUN.JKT	665/G/TF/2023/PTUN.JKT	27/G/2024/PTUN.JKT
90	197/G/2024/PTUN.JKT	40/G/TF/2024/PTUN.JKT	26/G/2024/PTUN.JKT
91	240/G/TF/2024/PTUN.JKT	663/G/TF/2023/PTUN.JKT	37/G/2024/PTUN.JKT
92	231/G/TF/2024/PTUN.JKT	33/G/2024/PTUN.JKT	44/G/2024/PTUN.JKT
93	179/G/2024/PTUN.JKT	53/G/TF/2024/PTUN.JKT	650/G/2023/PTUN.JKT
94	196/G/TF/2024/PTUN.JKT	657/G/TF/2023/PTUN.JKT	10/G/2024/PTUN.JKT
95	223/G/2024/PTUN.JKT	16/G/2024/PTUN.JKT	71/G/2024/PTUN.JKT
96	217/G/2024/PTUN.JKT	671/G/TF/2023/PTUN.JKT	48/G/2024/PTUN.JKT
97	232/G/2024/PTUN.JKT	20/G/2024/PTUN.JKT	19/G/2024/PTUN.JKT
98	233/G/2024/PTUN.JKT	21/G/2024/PTUN.JKT	35/G/2024/PTUN.JKT
99	230/G/TF/2024/PTUN.JKT	32/G/2024/PTUN.JKT	36/G/2024/PTUN.JKT
100	202/G/2024/PTUN.JKT	52/G/TF/2024/PTUN.JKT	97/G/2024/PTUN.JKT
101	203/G/2023/PTUN.JKT	2/G/TF/2024/PTUN.JKT	106/G/2024/PTUN.JKT
102	242/G/2024/PTUN.JKT	666/G/TF/2023/PTUN.JKT	3/G/2024/PTUN.JKT
103	201/G/2024/PTUN.JKT	667/G/TF/2023/PTUN.JKT	83/G/2024/PTUN.JKT
104	180/G/2024/PTUN.JKT	15/G/2024/PTUN.JKT	84/G/2024/PTUN.JKT
105	210/G/2024/PTUN.JKT	24/G/TF/2024/PTUN.JKT	74/G/2024/PTUN.JKT
106	188/G/TF/2024/PTUN.JKT	28/G/2024/PTUN.JKT	604/G/2023/PTUN.JKT
107	258/G/TF/2024/PTUN.JKT	22/G/2024/PTUN.JKT	85/G/2024/PTUN.JKT
108	277/G/2024/PTUN.JKT	43/G/TF/2024/PTUN.JKT	72/G/2024/PTUN.JKT
109	248/G/2024/PTUN.JKT	17/G/2024/PTUN.JKT	76/G/2024/PTUN.JKT
110	259/G/2024/PTUN.JKT	81/G/TF/2024/PTUN.JKT	1114/G/TF/2024/PTUN.JKT
111	292/G/2024/PTUN.JKT	82/G/TF/2024/PTUN.JKT	103/G/TF/2024/PTUN.JKT
112	255/G/2024/PTUN.JKT	87/G/TF/2024/PTUN.JKT	92/G/2024/PTUN.JKT
113	235/G/2024/PTUN.JKT	47/G/2024/PTUN.JKT	73/G/2024/PTUN.JKT
114	299/G/2024/PTUN.JKT	49/G/2024/PTUN.JKT	119/GTF/2024/PTUN.JKT
115	302/G/2024/PTUN.JKT	54/G/2024/PTUN.JKT	107/G/2024/PTUN.JKT
116	293/G/2024/PTUN.JKT	59/G/2024/PTUN.JKT	108/G/2024/PTUN.JKT
117	294/G/2024/PTUN.JKT	67/G/2024/PTUN.JKT	93/G/2024/PTUN.JKT
118	282/G/2024/PTUN.JKT	122/G/TF/2024/PTUN.JKT	116/G/2024/PTUN.JKT
119	275/G/2024/PTUN.JKT	80/G/TF/2024/PTUN.JKT	113/G/2024/PTUN.JKT
120	268/G/2024/PTUN.JKT	90/G/TF/2024/PTUN.JKT	127/G/2024/PTUN.JKT
121	253/G/2024/PTUN.JKT	95/G/20234/PTUN.JKT	134/G/2024/PTUN.JKT
122	232/LW/2024/PTUN.JKT	121/G/TF/2024/PTUN.JKT	135/G/2024/PTUN.JKT
123	215/G/2024/PTUN.JKT	50/G/2024/PTUN.JKT	38/G/2024/PTUN.JKT
124	309/G/2024/PTUN.JKT	112/G/TF/2024/PTUN.JKT	192/G/2024/PTUN.JKT
125	312/G/2024/PTUN.JKT	120/G/2024/PTUN.JKT	125/G/2024/PTUN.JKT

126	313/G/2024/PTUN.JKT	105/G/2024/PTUN.JKT	109/G/2024/PTUN.JKT
127	320/G/2024/PTUN.JKT	68/G/2024/PTUN.JKT	102/G/2023/PTUN.JKT
128	266/G/TF/2024/PTUN.JKT	75/G/2024/PTUN.JKT	141/G/2024/PTUN.JKT
129	311/G/2024/PTUN.JKT	69/G/2024/PTUN.JKT	111/G/2024/PTUN.JKT
130	132/G/2024/PTUN.JKT	70/G/2024/PTUN.JKT	130/G/2024/PTUN.JKT
131	325/G/2024/PTUN.JKT	79/G/2024/PTUN.JKT	110/G/2024/PTUN.JKT
132	247/G/KI/2024/PTUN.JKT	86/G/2024/PTUN.JKT	143/G/2024/PTUN.JKT
133	257/G/2024/PTUN.JKT	149/G/KI/2024/PTUN.JKT	133/G/TF/2024/PTUN.JKT
134	273/G/TF/2024/PTUN.JKT	117/G/KI/2024/PTUN.JKT	185/G/2024/PTUN.JKT
135	301/G/TF/2024/PTUN.JKT	104/G/2024/PTUN.JKT	170/G/2024/PTUN.JKT
136	286/G/TF/2024/PTUN.JKT	131/G/KI/2024/PTUN.JKT	16/G/2024/PTUN.JKT
137	319/G/2024/PTUN.JKT	99/G/2024/PTUN.JKT	165/G/2024/PTUN.JKT
138	327/G/2024/PTUN.JKT	123/G/2024/PTUN.JKT	194/G/TF/2024/PTUN.JKT
139	355/G/2024/PTUN.JKT	148/G/KI/2024/PTUN.JKT	168/G/TF/2024/PTUN.JKT
140	330/G/2024/PTUN.JKT	161/G/2024/PTUN.JKT	204/G/2024/PTUN.JKT
141	337/G/2024/PTUN.JKT	150/G/KI/2024/PTUN.JKT	221/G/2024/PTUN.JKT
142	345/G/2024/PTUN.JKT	158/G/TF/2024/PTUN.JKT	213/G/TF/2024/PTUN.JKT
143	348/G/2024/PTUN.JKT	151/G/KI/2024/PTUN.JKT	241/G/2024/PTUN.JKT
144	349/G/2024/PTUN.JKT	128/G/2024/PTUN.JKT	252/G/2024/PTUN.JKT
145	350/G/2024/PTUN.JKT	124/G/2024/PTUN.JKT	92/G/2024/PTUN.JKT
146	351/G/2024/PTUN.JKT	138/G/2024/PTUN.JKT	73/G/2024/PTUN.JKT
147	352/G/2024/PTUN.JKT	183/G/KI/2024/PTUN.JKT	37/G/2024/PTUN.JKT
148	353/G/2024/PTUN.JKT	136/G/2024/PTUN.JKT	44/G/2024/PTUN.JKT
149	354/G/2024/PTUN.JKT	175/G/2024/PTUN.JKT	
150	356/G/2024/PTUN.JKT	142/G/TF/2024/PTUN.JKT	
151	357/G/2024/PTUN.JKT	154/G/TF/2024/PTUN.JKT	
152	363/G/2024/PTUN.JKT	181/G/2024/PTUN.JKT	
153	364/G/2024/PTUN.JKT	166/G/TF/2024/PTUN.JKT	
154	365/G/2024/PTUN.JKT	190/G/2024/PTUN.JKT	
155	366/G/2024/PTUN.JKT	163/G/2024/PTUN.JKT	
156	281/G/KI/2024/PTUN.JKT	238/G/TF/2024/PTUN.JKT	
157	291/G/TF/2024/PTUN.JKT	155/G/2024/PTUN.JKT	
158	303/G/KI/2024/PTUN.JKT	182/G/2024/PTUN.JKT	
159	375/G/2024/PTUN.JKT	207/G/TF/2024/PTUN.JKT	
160	415/G/2024/PTUN.JKT	162/G/2024/PTUN.JKT	
161	340/G/2024/PTUN.JKT	171/G/2024/PTUN.JKT	
162	422/G/2024/PTUN.JKT	167/G/2024/PTUN.JKT	
163	346/G/2024/PTUN.JKT	176/G/2024/PTUN.JKT	
164	435/G/2024/PTUN.JKT	260/G/KI/2024/PTUN.JKT	
165	436/G/2024/PTUN.JKT	177/G/2024/PTUN.JKT	
166	445/G/2024/PTUN.JKT	199/G/TF/2024/PTUN.JKT	
167	421/G/2024/PTUN.JKT	178/G/2024/PTUN.JKT	
168	424/G/2024/PTUN.JKT	214/G/2024/PTUN.JKT	

169	345/PLW/2024/PTUN.JKT	218/G/2024/PTUN.JKT	
170	439/G/2024/PTUN.JKT	220/G/2024/PTUN.JKT	
171	452/G/2024/PTUN.JKT	189/G/2024/PTUN.JKT	
172	339/G/2024/PTUN.JKT	200/G/2024/PTUN.JKT	
173	262/G/2024/PTUN.JKT	227/G/2024/PTUN.JKT	
174	482/G/2024/PTUN.JKT	209/G/2024/PTUN.JKT	
175		224/G/2024/PTUN.JKT	
176		208/G/2024/PTUN.JKT	
177		547/G/2023/PTUN.JKT	
178		228/G/2024/PTUN.JKT	
179		216/G/2024/PTUN.JKT	
180		239/G/2024/PTUN.JKT	
181		219/G/TF/2024/PTUN.JKT	
182		226/G/2024/PTUN.JKT	
183		251/G/KI/2024/PTUN.JKT	
184		222/G/2024/PTUN.JKT	
185		264/G/2024/PTUN.JKT	
186		236/G/2024/PTUN.JKT	
187		297/G/TF/2024/PTUN.JKT	
188		274/G/TF/2024/PTUN.JKT	
189		237/G/2024/PTUN.JKT	
190		234/G/2024/PTUN.JKT	
191		285/G/2024/PTUN.JKT	
192		269/G/TF/2024/PTUN.JKT	
193		249/G/2024/PTUN.JKT	
194		256/G/2024/PTUN.JKT	
195		225/G/2024/PTUN.JKT	
196		261/G/2024/PTUN.JKT	
197		270/G/2024/PTUN.JKT	
198		243/G/2024/PTUN.JKT	
199		278/G/2024/PTUN.JKT	
200		279/G/2024/PTUN.JKT	
201		262/G/TF/2024/PTUN.JKT	
202		246/G/TF/2024/PTUN.JKT	
203		245/G/2024/PTUN.JKT	
204		272/G/2024/PTUN.JKT	
205		265/G/2024/PTUN.JKT	
206		305/G/2024/PTUN.JKT	
207		295/G/2024/PTUN.JKT	
	<b>174 PERKARA</b>	<b>207 PERKARA</b>	<b>148 PERKARA</b>

3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2024

Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Perkara			Putusan						Sisa Perkara	Permohonan			
		Masuk	Dicabut	Jumlah	Gugur	Dicabut	Ditolak	Tidak Diterima	Dikabulkan	Jumlah		Banding	Kasasi	PK	Eksekusi
2	3	4	5	6	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>GUGATAN</b>															
Pertanahan	21	63	14	69	0	7	4	29	11	51	19	39	33	7	4
Kepegawaian	5	30	4	31	0	7	12	8	3	30	1	13	8	3	0
Perijinan	34	70	5	99	0	9	8	22	32	71	28	40	45	20	4
Lingkungan Hidup	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Tender / Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Hukum/ Parpol	14	51	3	62	0	6	3	22	4	35	27	15	22	3	0
Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kepala Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proses Pemilihan Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penggantian Antar Waktu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sengketa Informasi Publik/KIP	2	21	0	23	0	0	12	0	4	16	7	0	8	2	0
Pengadaan Tanah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiktif Positif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyalahgunaan Wewenang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tindakan Administrasi Pemerintahan	56	104	2	158	0	15	19	42	52	128	30	84	245	25	0
Merek	1	2	0	3	0	0	1	1	0	2	1	1	0	1	0
Lain Lain	61	150	20	191	0	15	37	79	17	148	43	75	69	4	5
<b>JUMLAH</b>	194	493	48	638	0	59	96	203	123	481	158	264	430	65	13

**Keterangan :**

- **Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding**

Jumlah Perkara Putus Tahun 2024 sejumlah **529** Perkara, dikurangi Perkara Permohonan Banding sebanyak **267** Perkara, jadi perkara yang tidak mengajukan hukum Banding sebanyak **262** Perkara.

- **Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Jumlah sisa Perkara banding tahun 2023 sejumlah **252** Perkara, Perkara yang dimohonkan Banding di Tahun 2024 sejumlah **267** Perkara, dan Perkara putus Banding tahun 2024 sejumlah **461** Perkara, dikurangi Perkara Permohonan Kasasi sebanyak **430** Perkara, jadi perkara yang tidak mengajukan hukum Kasasi sebanyak **31** Perkara.

- **Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali ( PK )**

Jumlah sisa Perkara Kasasi di Tahun 2023 sejumlah **125**, Perkara yang dimohonkan Kasasi di Tahun 2024 sejumlah **430** Perkara, dan Perkara Putus Kasasi Tahun 2024 sebanyak **195** dikurangi Perkara Permohonan PK sebanyak **65** Perkara, jadi perkara yang tidak mengajukan hukum PK sebanyak **130** Perkara.

## Biaya Perkara / Panjar Biaya Perkara

No.	Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	Saldo Awal	1.588.366.110	-	-	-
2	Penerimaan Tahun ini	-	1.731.089.677	-	-
3	Biaya Proses/ ATK / Pemberkasan	-	-	153.080.000	-
4	Biaya Panggilan	-	-	54.626.034	-
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	34.163.500	-
6	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	-	140.875.500	-
7	Pengiriman Biaya Perkara	-	-	193.757.700	-
8	Materai	-	-	6.490.000	-
9	PNBP				
	a. Pendaftaran	-	-	65.720.000	-
	b. Redaksi	-	-	8.280.000	-
	c. Lainnya	-	-	181.625.227	-
	d. Sisa Panjar disetor	-	-	498.500	-
10	Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara	-	-	311.501.551	-
11	Biaya Lainnya Pengumuman Media	-	-	-	-
12	Pemberkasan dan Pengiriman	-	-	233.796.260	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.588.366.110</b>	<b>1.731.089.677</b>	<b>1.384.114.272</b>	<b>1.935.341.51</b>

### C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

#### 1. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum adalah Layanan yang dibentuk oleh Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka pemerataan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang kurang mampu (Justice For All), maka disusunlah suatu program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat dengan dibiayai oleh negara.

Pengadaan Jasa Konsultan Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum yang bersumber dari dana APBN DIPA TA 2024 Nomor SP DIPA-005.05.2.526733/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dilaksanakan dengan menggunakan metode Pengadaan Langsung.

Dalam Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah merealisasikan pelaksanaan Posbakum dengan jumlah layanan 96 orang Layanan dengan Biaya sebesar Rp. 33.000.000,- yang seluruhnya dibiayai dari anggaran DIPA 05 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

#### Jumlah Layanan Posbakum Tahun 2024

No.	Bulan	Jumlah Pengguna Posbakum Tahun 2024
1	Januari	5 Orang
2	Februari	23 Orang
3	Maret	12 Orang
4	April	9 Orang
5	Mei	17 Orang
6	Juni	10 Orang
7	Juli	16 Orang
8	Agustus	15 Orang
9	September	10 Orang
10	Oktober	13 Orang
11	Nopember	7 Orang
12	Desember	5 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>142 Orang</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa jumlah capaian layanan bagi Masyarakat yang memanfaatkan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebanyak 142 Orang telah melampaui dari target yang dibebankan pada DIPA tahun anggaran 2024 yakni 96 orang.

## **2. Prodeo**

Prodeo adalah Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Pengadilan Tata Usah Negara Jakarta dengan menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sehingga setiap orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara Cuma-Cuma.

Selama periode tahun 2024 jumlah perkara dengan biaya Cuma-Cuma / Prodeo sebanyak 2 Perkara.

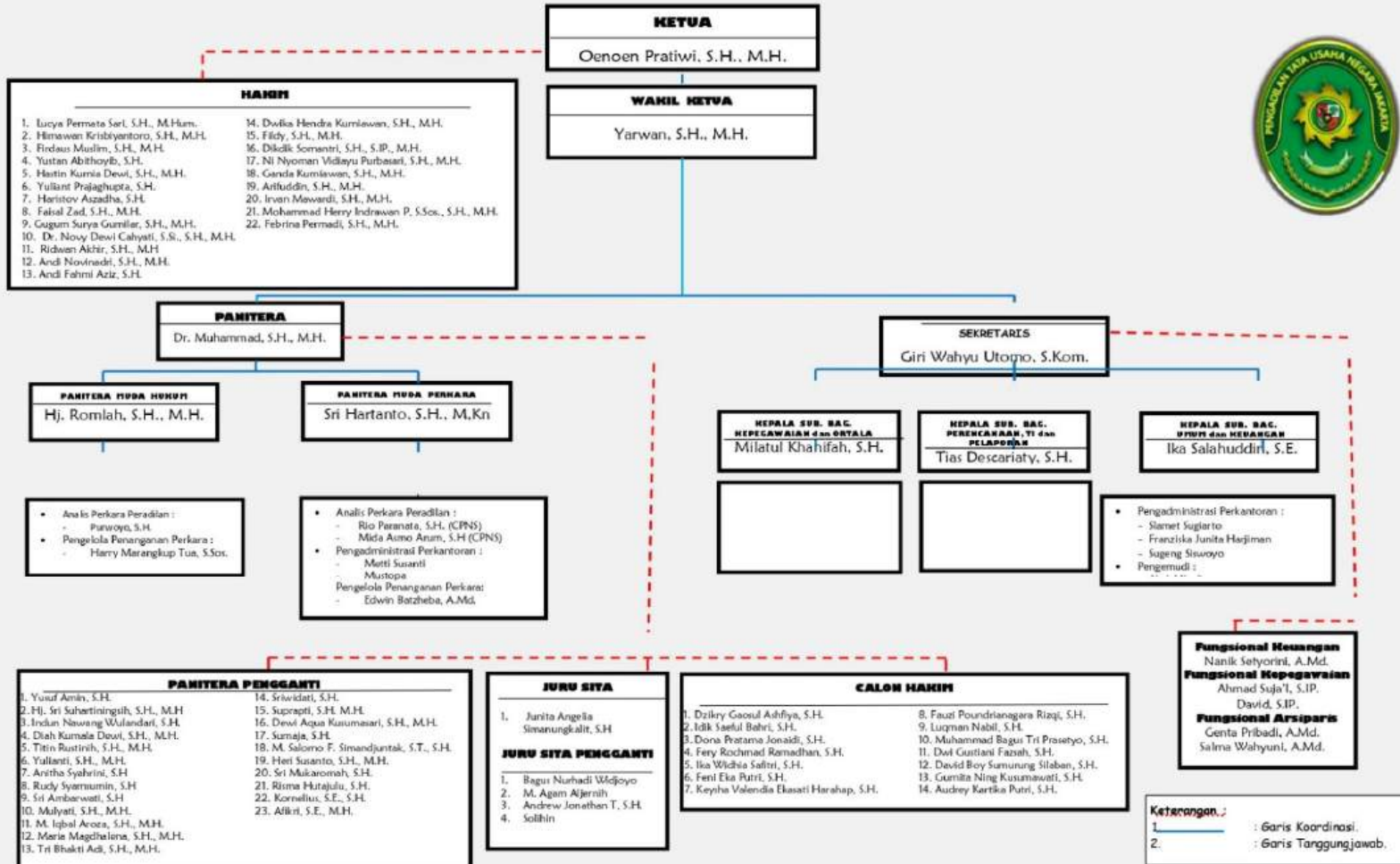
Anggaran Perkara Prodeo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024 berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-005.05.2.526733/2024 tanggal 24 Nopember 2023 terdapat anggaran belanja biaya Perkara Prodeo untuk 2 ( dua ) perkara sebesar Rp. 1.020.000,-.

**BAB III**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

**REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI MENURUT PANGKAT, GOLONGAN PENDIDIKAN  
DAN JENIS KELAMIN BERDASARKAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

No	J A B A T A N	JUMLAH	JENIS KELAMIN		GOL. IV					GOL. III				GOL. II				GOL. I				KETERANGAN								
			LK	PR	e	d	c	b	a	d	c	b	a	d	c	b	a	d	c	b	a		VII	S.3	S.2	S.1	D.3	SLTA	SMP	SD
<b>I HAKIM</b>																														
	1. KETUA	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. WAKIL KETUA	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. HAKIM	22	17	5	-	-	2	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	5	-	-	-	-	-
	4. CALON HAKIM	14	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-
<b>II KEPANITERAAN</b>																														
	1. PANITERA	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	2. PANITERA MUDA	2	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	3. PANITERA PENGGANTI	22	9	13	-	-	-	10	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	10	-	-	-	-	-
	4. JURUSITA	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	5. JURUSITA PENGGANTI	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-
<b>III KESEKRETARIATAN</b>																														
	1. SEKRETARIS	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	2. KASUB.BAG. KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	3. KA.SUB.BAG. UMUM DAN KEUANGAN	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	4. KA. SUB BAG. PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	5. STAF	17	11	6	-	-	-	1	1	2	5	3	2	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	6	4	5	-	1
JUMLAH		89	54	35	0	0	2	3	33	17	2	7	19	3	1	0	0	0	1	0	0	1	1	2	33	41	4	8	0	1

## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA



Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sampai dengan bulan Desember 2024 adalah sebanyak 100 (seratus) orang dengan perincian 24 (dua puluh empat) orang Hakim, 65 (enam puluh lima) orang Aparatur Sipil Negara, dan 11 (sebelas) orang PPNPN yang terdiri dari 63 (enam puluh tiga) orang laki-laki dan 37 (tiga puluh tujuh) orang perempuan.

### A.1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

#### a. Hakim

Jumlah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebanyak 24 ( dua puluh empat) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Keterangan
1.	Oenoen Pratiwi, S.H., M.H. Nip. 19721026 199203 2 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua	
2.	Yarwan, S.H., M.H. Nip. 19740307 199303 1 004	Pembina Utama Muda (IV/c)	Wakil Ketua	
3.	Lucya Permata Sari, S.H., M.Hum. Nip. 19770217 200312 2 002	Pembina Tk. I (IV/b)	Hakim	
4.	Himawan Krisbiyantoro, S.H., M.H. Nip. 19790217 200312 1 001	Pembina Tk.I (IV/b)	Hakim	
5.	Firdaus Muslim, S.H., M.H. Nip. 19700115 200502 1 001	Pembina (IV/a)	Hakim	
6.	Yustan Abithoyib, S.H. Nip. 19750227 200502 1 001	Pembina (IV/a)	Hakim	
7.	Hastin Kurnia Dewi, S.H., M.H. Nip. 19751208 200502 2 001	Pembina (IV/a)	Hakim	
8.	Yuliant Prajaghupta, S.H. Nip. 19780720 200502 1 002	Pembina (IV/a)	Hakim	

9.	Haristov Aszadha, S.H. Nip. 19790526 200502 1 001	Pembina (IV/a)	Hakim	
10.	Faisal Zad, S.H., M.H. Nip. 19750514 200502 1 001	Pembina (IV/a)	Hakim	
11.	Gugum Surya Gumilar, S.H., M.H. Nip. 19770413 200502 1 001	Pembina (IV/a)	Hakim	
12.	Dr. Novy Dewi Cahyati, S.Si, S.H., M.H. Nip. 19801104 200604 2 004	Pembina (IV/a)	Hakim	
13.	Ridwan Akhir, S.H., M.H. Nip. 19730723 200604 1 002	Pembina (IV/a)	Hakim	
14.	Andi Noviandri, S.H., M.H. Nip. 19761107 200604 1 003	Pembina (IV/a)	Hakim	
15.	Andi Fahmi Azis, S.H. Nip. 19800530 200604 1 007	Pembina (IV/a)	Hakim	
16.	Dwika Hendra Kurniawan, S.H., M.H. Nip. 19731127 200604 1 004	Pembina (IV/a)	Hakim	
17.	Fildy, S.H., M.H. Nip. 19781210 200604 1 004	Pembina (IV/a)	Hakim	
18.	Dikdik Somantri, S.H., S.IP., M.H. Nip. 19730227 200604 1 001	Pembina (IV/a)	Hakim	
19.	Ni Nyoman Vidiayu Purbasari, S.H., M.H. Nip. 19740413 200604 2 003	Pembina (IV/a)	Hakim	
20.	Ganda Kurniawan, S.H. Nip. 1983013 200704 1 001	Pembina (IV/a)	Hakim	
21.	Arifuddin, S.H. Nip. 19820124 200704 1 001	Pembina (IV/a)	Hakim	
22.	Irvan Mawardi, S.H., M.H. Nip. 19800609 200805 1 001	Pembina (IV/a)	Hakim	
23.	Mohammad Herry Indrawan Patiradja, S.Sos., S.H., M.H. Nip. 19780708 200805 1 001	Pembina (IV/a)	Hakim	
24.	Febrina Permadi, S.H., M.H. Nip. 19850218 200912 2 005	Penata Tk. I (III/d)	Hakim	

**b. Kepaniteraan**

Jumlah personil Kepaniteraan sebanyak 25 ( dua Puluh lima ) orang termasuk Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Keterangan
1.	Muhammad, SH, MH Nip. 19690520 199203 1 004	Pembina Tk. I ( IV/b )	Panitera	
2.	Sri Hartanto, SH, M.Kn Nip. 19700411 199103 1 003	Pembina ( IV/a )	Panmud Perkara	
3.	Hj. Romlah, SH, MH Nip. 19680828 199303 2 002	Pembina ( IV/a )	Panmud Hukum	
4.	Diah Kumala Dewi, SH, MH Nip. 19690616 199303 2 002	Pembina ( IV/a )	Panitera Pengganti	
5.	Titin Rustinih, SH, MH Nip. 19710101 199603 2 004	Pembina ( IV/a )	Panitera Pengganti	
6.	Sri Ambarwati, SH, MH Nip. 19730121 199703 2 001	Pembina ( IV/a )	Panitera Pengganti	
7.	Heri Susanto, SH, MH Nip. 19680924 200212 1 005	Pembina ( IV/a )	Panitera Pengganti	
8.	Yulianti, SH, MH Nip. 19760718 199903 2 004	Pembina ( IV/a )	Panitera Pengganti	
9.	Mulyati, SH, MH Nip. 19740209 199903 2 002	Pembina ( IV/a )	Panitera Pengganti	
10.	M. Iqbal Aroza, SH Nip. 19780610 200003 1 003	Pembina ( IV/a )	Panitera Pengganti	
11.	Maria Maghdalena Hutapea, SH, MH Nip. 19690815 199603 2 002	Pembina ( IV/a )	Panitera Pengganti	
12.	Tri Bhakti Adi, SH, MH Nip. 19750824 199803 1 002	Pembina ( IV/a )	Panitera Pengganti	
13.	Afikri, SE, MH Nip. 19740708 200604 1 003	Pembina ( IV/a )	Panitera Pengganti	
14.	Yusuf Amin, SH Nip. 19670127 199103 1 001	Penata Tk. I ( III/d )	Panitera Pengganti	

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

15.	Indun Nawang Wulandari, SH Nip. 19701106 199503 2 001	Penata Tk. I ( III/d )	Panitera Pengganti	
16.	Rudi Syamsumin, SH Nip. 19751207 199903 1 005	Penata Tk. I ( III/d )	Panitera Pengganti	
17.	Anitha Syahrini, SH Nip. 19740402 200003 2 003	Penata Tk. I ( III/d )	Panitera Pengganti	
18.	Sri Mukaromah, SH Nip. 19650529 199103 2 003	Penata Tk. I ( III/d )	Panitera Pengganti	
19.	Sriwidati, SH Nip. 19750721 200012 2 001	Penata Tk. I ( III/d )	Panitera Pengganti	
20.	Risma Hutajulu, SH Nip. 19681006 199103 2 002	Penata Tk. I ( III/d )	Panitera Pengganti	
21.	Suprapti, SH, MH Nip. 19731028 200112 2 002	Penata Tk. I ( III/d )	Panitera Pengganti	
22.	Dewi Aqua Kusumasari, SH, MH Nip. 19840204 200904 2 011	Penata Tk. I ( III/d )	Panitera Pengganti	
23.	Sumaja, SH Nip. 19670816 199303 1 006	Penata Tk. I ( III/d )	Panitera Pengganti	
24.	M. Salomo F. Simandjuntak, ST, SH Nip. 19750222 200912 1 002	Penata Tk. I ( III/d )	Panitera Pengganti	
25.	Kornelius, SE, SH Nip. 19800719 200912 1 003	Penata ( III/c )	Panitera Pengganti	

**c. Juru Sita**

Jumlah Juru Sita pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebanyak 1 (satu) orang, sebagai berikut :

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Keterangan
1.	Junita Angelia Simanungkalit, S.H. Nip. 19850627 200904 2 006	Penata Muda Tk. I (III/b)	Juru Sita	

**d. Jurusita Pengganti**

Jumlah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebanyak 3 ( tiga ) orang, sebagai berikut :

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Keterangan
1.	Andrew Jonathan Tarigan, S.H. Nip. 19871202 201903 1 003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Jurusita Pengganti	
	Bagus Nurhadi Widjoyo Nip. 19871104 200604 1 001	Pengatur Muda ( III/a )	Jurusita Pengganti	
2.	Muhammad Agam Aljernih Nip. 19841019 200604 1 002	Penata Muda ( III/a )	Jurusita Pengganti	
3.	Solihin Nip. 19800908 200604 1 016	Pengatur Tk.I (II/d)	Jurusita Pengganti	

## A.2. Sumber Daya Manusia Non - Teknis Yudisial

### a. Kesekretariatan

Sumber Daya Manusia Non - Teknis Yudisial / Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebanyak 14 (empat belas) orang termasuk Pejabat Struktural, Fungsional, Pelaksana, dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) sebagai berikut :

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Ket
1.	Giri Wahyu Utomo, S.Kom. Nip. 19840326 200904 1 004	Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris	
2.	Milatul Khanifah, SH Nip. 19730515 199203 2 001	Penata Tk. I ( III/d )	Kasub. Bag. Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	
3.	Ika Salahudin, SE Nip. 19720411 200604 1 001	Penata Tk. I ( III/d )	Kasub. Bag. Umum dan Keuangan	
4.	Tias Descariasty, SH Nip.19841209 200604 2 002	Penata Tk. I ( III/d )	Kasub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	
5.	Nanik Setyorini, A.Md. Nip. 19740321 199703 2 001	Penata (III/c)	Penelaah Teknis Kebijakan	
6.	Slamet Sugiarto Nip. 19690609 199103 1 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Perkantoran	
7.	Franziska Junita Harjiman Nip. 19700618 199103 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Perkantoran	
8.	Ahmad Suja'l, S.IP. Nip. 19860614 201903 1 005	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	
9.	David, S.IP. Nip. 19930614 201903 1 005	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	

10.	Sugeng Siswoyo Nip. 19680122 200604 1 001	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Perkantoran	
11.	Genta Pribadi, A.Md. Nip. 19870315 202012 1 002	Pengatur (II/c)	Arsiparis Terampil / Pelaksana	
12.	Abdul Kodir Nip. 19700408 201212 1 003	Juru (I/c)	Pengemudi	
13.	Salma Wahyuni, A.Md. Nip. 19960928 202321 2 022	Tujuh (VII)	Arsiparis Terampil / Pelaksana	

**b. Kepaniteraan**

Jumlah Pelaksana di bagian Kepaniteraan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebanyak 8 (delapan) orang, sebagai berikut :

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Ket
1.	Hj. Sri Suhartiningsih, S.H., M.H. Nip. 19691119 198903 2 001	Pembina (IV/a)	Analisis Perkara Peradilan	
2.	Harry Marangkup Tua, S.Sos. Nip. 19811222 200604 1 005	Penata Tk. I (III/d)	Pengelola Penanganan Perkara	
3.	Purwoyo, S.H. Nip. 19800714 200604 1 013	Penata (III/c)	Analisis Perkara Peradilan	
4.	Metti Susanti Nip. 19750617 200212 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Perkantoran	
5.	Mustopa Nip. 19700314 200604 1 001	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Perkantoran	
6.	Edwin Bathzeba, A.Md. Nip. 19880211 202012 1 005	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengelola Penanganan Perkara	
7.	Rio Paranata, S.H. Nip. 19910105 202405 1 001	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan / Calon Pegawai Negeri Sipil	
8.	Mida Asmo Arum, S.H. Nip. 19941209 202405 2 002	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan / Calon Pegawai Negeri Sipil	

**c. Calon Hakim**

Jumlah Calon Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebanyak 14 (empat belas) orang, sebagai berikut :

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Ket
1.	Dzikry Gaosul Ashfiya, S.H. Nip. 19920215 202203 1 003	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	
2.	Idik Saeful Bahri, S.H. Nip. 19940213 202203 1 005	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	
3.	Dona Pratama Jonaidi, S.H. Nip. 19941214 202203 1 004	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	
4.	Fery Rochmad Ramadhan, S.H. Nip. 19950228 202203 1 006	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	
5.	Ika Widhia Safitri, S.H. Nip. 19960324 202203 2 008	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	
6.	Feni Eka Putri, S.H. Nip. 19960619 202203 2 009	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	
7.	Keysha Valendia Ekasati Harahap, S.H. Nip. 19970730 202203 2 012	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	
8.	Fauzi Poundrianagara Rizqi, S.H. Nip. 19980224 202203 1 011	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	
9.	Luqman Nabil, S.H. Nip. 19980808 202203 1 010	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	
10.	Muhammad Bagus Tri Prasetyo, S.H. Nip. 19990814 202203 1 003	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	
11.	Dwi Gustiani Fazsah, S.H. Nip. 19990818 202203 2 005	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	
12.	David Boy Sumurung Silaban, S.H. Nip. 19931201 202203 1 006	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	
13.	Gurnita Ning Kusumawati, S.H. Nip. 19950428 202203 2 008	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	

**d. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri**

Jumlah tenaga kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 11 (sebelas) orang, sebagai berikut :

No.	Nama / NIP	Keterangan
1.	Della Wahyudin	Satpam
2.	Asep Saepudin	Satpam
3.	Heru Setiawan, A.Md	Satpam
4.	M. Rizky Putrasyah	Pramubakti
5.	Mamat Nurahmat	Pramubakti
6.	Hasyim, SH	Pramubakti
7.	M. Rizal Muslim, A.Md	Pramubakti
8.	Jana amelia L Tobing	Pramubakti
9.	Devika Rahmanda	Pramubakti
10.	Bagus Nur Ronggo Paming	Satpam
11.	Rangga Nur Hidayat	Satpam

**A. Mutasi**

**HAKIM**

Mutasi Masuk Kedalam Wilayah :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	Andi Noviandri, S.H., M.H. Nip. 19761107 200604 1 003	Hakim PTUN Semarang	Hakim PTUN Jakarta	2 Januari 2024
2.	Yuliant Prajaghupta, S.H. Nip. 19780720 200502 1002	Hakim PTUN Surabaya	Hakim PTUN Jakarta	29 Januari 2024
3.	Firdaus Muslim, S.H., M.H. Nip. 19700115 200502 1 001	Hakim PTUN Medan	Hakim PTUN Jakarta	29 Juli 2024
4.	Haristov Aszadha, S.H. Nip. 19790526 200502 1 002	Hakim PTUN Serang	Hakim PTUN Jakarta	22 Oktober 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
5.	Gugum Surya Gumilar, S.H., M.H. Nip. 19770413 200502 1 001	Hakim PTUN Bandung	Hakim PTUN Jakarta	1 November 2024
6.	Yarwan, S.H., M.H. Nip. 19740307 199303 1 004	Ketua PTUN Padang	Wakil Ketua PTUN Jakarta	21 November 2024

### PEGAWAI

Mutasi Masuk Kedalam Wilayah :

NO.	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
1.	Idik Saeful Bahri, S.H. Nip. 19940213 202203 1 005	Analisis Perkara Peradilan PN Bontang	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim PTUN Jakarta	5 Februari 2024
2.	Dona Pratama Jonaidi, S.H. Nip. 19941214 202203 1 004	Analisis Perkara Peradilan Ditjen Badimiltun MA RI	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim PTUN Jakarta	5 Februari 2024
3.	Fery Rochmad Ramadhan, S.H. Nip. 19950228 202203 1 006	Analisis Perkara Peradilan PA Ambon	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim PTUN Jakarta	5 Februari 2024
4.	Ika Widhia Safitri, S.H. Nip. 19960324 202203 2 008	Analisis Perkara Peradilan PA Jakarta Utara	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim PTUN Jakarta	5 Februari 2024
5.	Feni Eka Putri, S.H. Nip. 19960619 202203 2 009	Analisis Perkara Peradilan PA Samarinda	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim PTUN Jakarta	5 Februari 2024
6.	Keysha Valendia Ekasati Harahap, S.H. Nip. 19970730 202203 2 012	Analisis Perkara Peradilan PTA Jakarta	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim PTUN Jakarta	5 Februari 2024

7.	Fauzi Poundrianagara Rizqi, S.H. Nip. 19980224 202203 1 011	Analisis Perkara Peradilan PA Bitung	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim PTUN Jakarta	5 Februari 2024
8.	Luqman Nabil, S.H. Nip. 19980808 202203 1 010	Analisis Perkara Peradilan PA Bengkalis	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim PTUN Jakarta	5 Februari 2024
9.	Muhammad Bagus Tri Prasetyo, S.H. Nip. 19990814 202203 1 003	Analisis Perkara Peradilan Ditjen Badimiltun MA RI	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim PTUN Jakarta	5 Februari 2024
10.	David Boy Sumurung Silaban, S.H. Nip. 19931201 202203 1 006	Analisis Perkara Peradilan PA Donggala	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim PTUN Jakarta	5 Februari 2024
11.	Gurnita Ning Kusumawati, S.H. Nip. 19950428 202203 2 008	Analisis Perkara Peradilan PTTUN Jakarta	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim PTUN Jakarta	5 Februari 2024
12.	Audrey Kartika Putri, S.H. Nip. 19991222 202203 2 006	Analisis Perkara Peradilan PN Muara Bulian	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim PTUN Jakarta	5 Februari 2024

### Mutasi Keluar Wilayah

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
1.	Andi Maderumpu, S.H., M.H.	Hakim PTUN Jakarta	Wakil Ketua PTUN Pangkal Pinang	26 Januari 2024
2.	Fajri Citra Resmana, S.H., M.H.	Hakim PTUN Jakarta	Hakim PTUN Yogyakarta	29 Juli 2024
3.	Oktova Primasari, S.H.	Hakim PTUN Jakarta	Wakil Ketua PTUN Jambi	26 Agustus 2024
4.	Joko Setiono, S.H., M.H.	Wakil Ketua PTUN Jakarta	Hakim Tinggi PTTUN Mataram	13 November 2024
5.	Estiningtyas Diana Mandagi, S.H., M.H.	Hakim PTUN Jakarta	Hakim PTUN Surabaya	9 Desember 2024
6.	Sahibur Rasid, S.H., M.H.	Hakim PTUN Jakarta	Hakim PTUN Serang	9 Desember 2024

**Mutasi Pegawai Negeri Sipil :**

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	Luddimin, S.H.	Pengolah Data dan Informasi PTUN Jakarta	Panitera Pengganti PTUN Serang	23 Juli 2024
2.	Jumarta, S.H., M.H.	Panitera Pengganti PTUN Jakarta	Panitera Pengganti PTTUN Jakarta	31 Juli 2024
3.	Almercy, S.H	Panitera Pengganti PTUN Jakarta	Panitera Pengganti PTTUN Jakarta	31 Juli 2024

**B. Promosi**

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	Andrew Jonathan Tarigan, S.H. Nip. 19871202 201903 1 003	Analisis Perkara Peradilan PTUN Jakarta	Jurusita Pengganti PTUN Jakarta	29 Juli 2024
2.	Solihin Nip. 19800908 200604 1 016	Pengadministrasi Perkantoran PTUN Jakarta	Jurusita Pengganti PTUN Jakarta	29 Juli 2024
3.	Nanik Setyorini, A.Md. Nip. 19740321 199703 2 001	Penelaah Teknis Kebijakan PTUN Jakarta	Pranata Keuangan APBN Penyelia PTUN Jakarta	29 Agustus 2024
4.	Yarwan, S.H., M.H. Nip. 19740307 199303 1 004	Ketua PTUN Padang	Wakil Ketua PTUN Jakarta	21 November 2024
5.	Junita Angelia Simanungkalit, S.H. Nip. 19850627 200904 2 006	Jurusita Pengganti PTUN Jakarta	Juru Sita PTUN Jakarta	4 Desember 2024

**PEGAWAI BARU :**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PENEMPATAN	KETERANGAN
1.	-	-	-	-

C. PENSIUN :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	KETERANGAN
1.	-	-	-

D. DIKLAT

Diklat / Bimtek / Sosialisasi (Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

No.	Nama / NIP	Jabatan	Nama Diklat / Bimtek
1.	Bimbingan Teknis Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Himawan Krisbiyantoro, S.H., M.H.	5 s.d 7 Februari 2024
2.	Pelatihan <i>Training of Tutor</i> dan <i>Training of Mentor</i> Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Tata Usaha Negara Angkatan IV	1. Oenoen Pratiwi, S.H., M.H. 2. Lucya Permata Sari, S.H., M.Hum. 3. Yuliant Prajaghupta, S.H. 4. Dikdik Somantri, S.H., S.IP., M.H. 5. Ni Nyoman Vidiayu Purbasari, S.H., M.H. Mohammad Herry Indrawan Patiradja, S.Sos., S.H., M.H.	14 s.d 19 Februari 2024
3.	Bimbingan Teknis dalam rangka Peningkatan Nilai IKPA Tahun 2024	1. Ika Salahuddin, S.E. Muhammad Rizki Putrasyah, A.Md.Kom.	28 Februari 2024
4.	Pelatihan Pemaknaan KEPH	Sahibur Rasid, S.H., M.H.	29 Februari s.d 03 Maret 2024
5.	Pelatihan Singkat Sengketa Administrasi Perkara Secara Elektronik dan Persidangan Elektronik (E-Litigation) Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	Dikdik Somantri, S.H., S.IP., M.H.	3 s.d 21 April 2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

6.	Pelatihan Online Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara Batch II Bekerjasama dengan Diklat PKN BPK RI Wilayah Jakarta TA 2024	Ika Salahuddin, S.E.	22 s.d 24 April 2024
7.	Bimbingan Teknis Upaya Hukum Secara Elektronik Bagi Panitera Muda Perkara di Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2024	Sri Hartanto, S.H., M.Kn.	20 s.d 22 Mei 2024
8.	Bimbingan Teknis Persidangan Secara Elektronik ( <i>E-Court</i> ) dan Pemberkasan/Minutasi	1. Suprapti, S.H., M.H. 2. Kornelius, S.E., S.H. Andrew Jonathan Tarigan, S.H.	20 s.d 22 Mei 2024
9.	Pelatihan <i>Online</i> Manajemen Resiko Kelas B Gelombang XII Tahun 2024	1. Milatul Khanifah, S.H. Tias Descariasty, S.H.	22 s.d 26 Juli 2024
10.	Bimbingan Teknis Sengketa Pengesahan Badan Hukum bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	1. Hastin Kurnia Dewi, S.H., M.H. 2. Andi Noviandri, S.H., M.H. Febrina Permadi, S.H., M.H.	24 s.d 26 Juli 2024
11.	Sosialisasi Pedoman Eksekusi Putusan Pengadilan Bagi Para Panitera dan Panitera Muda Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2024	1. Dr. Muhammad, S.H., M.H. Sri Hartanto, S.H., M.Kn.	24 s.d 26 Juli 2024
12.	Bimbingan Teknis Penyusunan Berita Acara Persidangan Bagi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2024	1. Kornelius, S.E., S.H. 2. Afikri, S.E., M.H.	24 s.d 26 Juli 2024
13.	Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Seluruh Pengadilan Provinsi DKI Jakarta Pada Pengadilan Tk. Banding dan Tk. Pertama	1. Ika Salahuddin, S.E. 2. Purwoyo, S.H.	08 Agustus 2024

14.	<i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Draf Naskah Akademis Status dan Kedudukan Jabatan Kepaniteraan	Dr. Muhammad, S.H., M.H.	16 Agustus 2024
15.	Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap	1. Oenoen Pratiwi, S.H., M.H. 2. Joko Setiono, S.H., M.H. Dr. Muhammad, S.H., M.H.	22 s.d 24 Agustus 2024
16.	Pelatihan Sertifikasi Pertanahan Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	1. Dwika Hendra Kurniawan, S.H., M.H. Ganda Kurniawan, S.H.	27 September s.d 16 Oktober 2024
17.	Diklat II Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Tata Usaha Negara Angkatan IV Gelombang 3	1. Audrey Kartika, S.H. 2. Dona Pratama Jonaidi, S.H. 3. Dwi Gustiani Fazsah, S.H. 4. Dzikry Gaousul Ashfiya, S.H. 5. Feni Eka Putri, S.H. 6. Gurnita Ning Kusumawati, S.H. 7. Ika Widhia Safitri, S.H. 8. Keysha Valendia Ekasati Harahap, S.H. 9. Muhammad Bagus Tri Prasetyo, S.H. 10. David Boy Sumurung Silaban, S.H. 11. Fery Rochmad Ramadhan, S.H. 12. Idik Saeful Bahri, S.H. 13. Luqman Nabil, S.H. 14. Fauzi Poundrianagara Rizqi, S.H.	30 September s.d 22 November 2024
18.	Sosialisasi Terkait Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024 pada KPPN Jakarta VI	1. Giri Wahyu Utomo, S.Kom. 2. Genta Pribadi, A.Md.	1 Oktober 2024
19.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan III Gelo. III Tahun 2024 secara Klasikal atau Tatap Muka	1. Rio Paranata, S.H. 2. Mida Asmo Arum, S.H.	13 s.d 19 Oktober 2024
20.	Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Kepegawaian Angkatan II Secara <i>Online</i>	David, S.IP.	11 s.d 24 Oktober 2024

21.	Bimbingan Teknis Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	1. Tias Descariasty, S.H 2. Mohamad Rizal Muslim, A.Md.	13 s.d 15 November 2024
22.	Bimbingan Teknis Layanan BMN di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	1. Genta Pribadi, A.Md. 2. Muhammad Rizki Putrasyah, A.Md.Kom.	26 November 2024
23.	Pelatihan " <i>Asia Pacific Judicial Convening On Environment and Climate Law Adjudication</i> " oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI c.q Pusdiklat Teknis Peradilan Kerjasama dengan <i>Client Earth dan Indonesia Center Enviromental Law (ICEL)</i>	Febrina Permadi, S.H., M.H.	1 s.d 7 Desember 2024

## KENAIKAN PANGKAT

### a. PERIODE APRIL 2024

No	NAMA / NIP	PANGKAT SEBELUMNYA	PANGKAT USULAN	JENIS USULAN
1.	LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum. Nip. 19770217 200312 2 001	Pembina (IV/a)	Pembina TK. I (IV/b)	Kenaikan Pangkat Reguler
2.	SAHIBUR RASID, S.H., M.H. Nip. 19790715 200805 1 002	Penata Tk.I (III/d)	Pembina (IV/a)	Kenaikan Pangkat Reguler
3.	PURWOYO, S.H. Nip. 19800714 200604 1 013	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata (III/c)	Kenaikan Pangkat Reguler
4.	SUGENG SISWOYO Nip. 19680122 200604 1 001	Pengatur (II/c)	Pengatur TK. I (II/d)	Kenaikan Pangkat Reguler
5.	SOLIHIN Nip. 19800908 200604 1 016	Pengatur (II/c)	Pengatur TK. I (II/d)	Kenaikan Pangkat Reguler

**b. PERIODE OKTOBER 2024**

No	NAMA / NIP	PANGKAT SEBELUMNYA	PANGKAT USULAN	JENIS USULAN
1.	HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H. NIP. 19790217 200312 1 001	Pembina (IV/a)	Pembina TK. I (IV/b)	Kenaikan Pangkat Reguler
2.	IRVAN MAWARDI, S.H., M.H. Nip. 19800609 200805 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Pembina (IV/a)	Kenaikan Pangkat Reguler

**c. PERIODE DESEMBER 2024**

No	NAMA / NIP	PANGKAT SEBELUMNYA	PANGKAT USULAN	JENIS USULAN
1.	GIRI WAHYU UTOMO, S.Kom. NIP. 19840326 200904 1 004	Penata Tk.I (III/d)	Pembina (IV/a)	Kenaikan Pangkat Reguler
2.	EDWIN BATHZEBA, A.Md. Nip. 19880211 202012 1 005	Pengatur (II/c)	Pengatur Tk.I (II/d)	Kenaikan Pangkat Reguler

**- DAFTAR KENAIKAN GAJI BERKALA**

No	NAMA	PANGKAT / GOL RUANG	JABATAN	T.M.T KGB
1.	Sri Hartanto, S.H., M.Kn	Pembina (IV/a)	Panitera Muda Perkara	01 Maret 2024
2.	Hj. Sri Suhartingsih, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Analisis Perkara Peradilan	01 Maret 2024
3.	Jumarta, S.H.	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	01 Maret 2024
4.	Titin Rustinih, S.H., M.H	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	01 Maret 2024
5.	M. Iqbal Aroza, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	01 Maret 2024
6.	Maria Magdhalena Hutapea, S.H., M.H	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	01 Maret 2024
7.	Tri Bhakti Adi, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	01 Maret 2024

No	NAMA	PANGKAT / GOL RUANG	JABATAN	T.M.T KGB
8.	Yusuf Amin, S.H.	Penata Tk.I (III/d)	Panitera Pengganti	01 Maret 2024
9.	Almercy, S.H.	Penata Tk.I (III/d)	Panitera Pengganti	01 Maret 2024
10.	Anitha Syahrini, S.H.	Penata Tk.I (III/d)	Panitera Pengganti	01 Maret 2024
11.	Sri Mukaromah, S.H.	Penata Tk.I (III/d)	Panitera Pengganti	01 Maret 2024
12.	Risma Hutajulu, S.H.	Penata Tk.I (III/d)	Panitera Pengganti	01 Maret 2024
13.	Slamet Sugiarto	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengadministrasi Perkantoran	01 Maret 2024
14.	Franziska Junita Harjiman	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengadministrasi Persuratan	01 Maret 2024
15.	Dzikry Gaosul Ashfiya, S.H.	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	01 Maret 2024
16.	Dwi Gustiani Fazzah, S.H.	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	01 Maret 2024
17.	Idik Saeful Bahri, S.H.	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	01 Maret 2024
18.	Dona Pratama Jonaidi, S.H.	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	01 Maret 2024
19.	Fery Rochmad Ramadhan, S.H.	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	01 Maret 2024
20.	Ika Widhia Safitri, S.H.	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	01 Maret 2024
21.	Feni Eka Putri, S.H.	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	01 Maret 2024
22.	Keysha Valendia Ekasati Harahap, S.H.	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	01 Maret 2024
23.	Fauzi Poundrianagara Rizqi, S.H.	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	01 Maret 2024
24.	Luqman Nabil, S.H.	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	01 Maret 2024

No	NAMA	PANGKAT / GOL RUANG	JABATAN	T.M.T KGB
25.	Muhammad Bagus Tri Prasetyo, S.H.	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	01 Maret 2024
26.	David Boy Sumurung Silaban, S.H.	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	01 Maret 2024
27.	Gurnita Ning Kusumawati, S.H.	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	01 Maret 2024
28.	Audrey Kartika Putri, S.H.	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	01 Maret 2024
29.	Joko Setiono, S.H., M.H.	Pembina Utama Muda (IV/c)	Wakil Ketua	01 April 2024
30.	Dwika Hendra Kurniawan, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Hakim	01 April 2024
31.	Andi Noviandri, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Hakim	01 April 2024
32.	Dikdik Somantri, S.H., S.IP., M.H.	Pembina (IV/a)	Hakim	01 April 2024
33.	Ni Nyoman Vidiayu Purbasari, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Hakim	01 April 2024
34.	Andi Fahmi Aziz, S.H.	Pembina (IV/a)	Hakim	01 April 2024
35.	Dr. Novy Dewi Cahyati, S.Si., S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Hakim	01 April 2024
36.	Estiningtyas Diana Mandagi, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Hakim	01 April 2024
37.	Fildy, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Hakim	01 April 2024
38.	Ridwan Akhir, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Hakim	01 April 2024
39.	Ika Salahuddin, S.E.	Penata Tk.I (III/d)	Kasubag Umum & Keuangan	01 April 2024
40.	Afikri, S.E., M.H.	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	01 April 2024
41.	Harry Marangkuptua, S.Sos.	Penata Tk.I (III/d)	Pengelola Penanganan Perkara	01 April 2024
42.	Purwoyo, S.H.	Penata (III/c)	Analisis Perkara Peradilan	01 April 2024
43.	Muhammad Agam Aljernih	Penata Muda (III/a)	Juru Sita Pengganti	01 April 2024
44.	Mustopa	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Perkantoran	01 April 2024

No	NAMA	PANGKAT / GOL RUANG	JABATAN	T.M.T KGB
45.	Sugeng Siswoyo	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengadministrasi Perkantoran	01 April 2024
46.	Solihin	Pengatur Tk.I (II/d)	Juru Sita Pengganti	01 April 2024
47.	Bagus Nurhadi Widjoyo	Penata Muda (III/a)	Juru Sita Pengganti	01 April 2024
48.	Mohammad Herry Indrawan Patiradja, S.Sos., S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Hakim	01 Mei 2024
49.	Sahibur Rasid, S.H., M.H	Pembina (IV/a)	Hakim	01 Mei 2024
50.	Irvan Mawardi, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Hakim	01 Mei 2024
51.	Suprapti, S.H., M.H.	Penata Tk.I (III/d)	Panitera Pengganti	01 Desember 2024
52.	Edwin Bathzeba, A.Md.	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengelola Penanganan Perkara	01 Desember 2024
53.	Abdul Kodir	Juru (I/c)	Pengemudi	01 Desember 2024

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN**  
**TEKNOLOGI INFORMASI**

**A. Pengelolaan Keuangan**

Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (526732)	Rp. 13.935.206.000	Rp. 13.564.226.832	Rp. 370.979.168	97,34%

Rekapitulasi Belanja Barang Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (526732)	Rp. 2.787.430.000	Rp. 2.688.557.258	Rp. 98.872.742	96,45%

**Program Sarana dan Prasarana**

Program Sarana Dan Prasarana Tahun 2024 Untuk PTUN Jakarta Mendapat Pagu Anggaran Sebesar Rp. 16.722.636.000 ,-

Dengan Perincian :

1. Belanja Pegawai Rp. 13.935.206.000,-
2. Belanja Barang Rp. 2.787.430.000,-

**PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN**

Program peningkatan manajemen peradilan tahun 2024 untuk PTUN JAKARTA mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 63.660.000,-

NO.	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (526733)	Rp. 63.660.000,-	Rp. 62.550.000,-	Rp. 1.110.000,-	98,26%

**Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ( IKPA )**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 5/PB/2022, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Adapun Capaian IKPA Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :

➤ **DIPA 01**

**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN**

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	175	005	526732	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	Nilai	100.00	86.84	100.00	100.00	100.00	83.57	100.00	96.38	100%	0.00	96.38
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.03	20.00	10.00	10.00	8.36	25.00				
					Nilai Aspek	93.42		96.89			100.00					

Berdasarkan tabel di atas IKPA tahun anggaran 2024 adalah sebesar 96,38.

➤ DIPA 05

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	175	005	526733	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	Nilai	100.00	67.25	80.85	0.00	0.00	92.02	100.00	70.46	80%	0.00	88.07
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.09	16.17	0.00	0.00	9.20	25.00				
					Nilai Aspek	83.63		86.44		100.00						

Berdasarkan tabel di atas IKPA tahun anggaran 2024 adalah sebesar 88,07.

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

No	Sarana / Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
<b>1. a</b>	<b>Ruang Ketua</b>	<b>1</b>	<b>Ruangan</b>
	- Meja Ruang Ketua	1	Unit
	- Kursi Kerja Ketua	1	Unit
	- Kursi Hadap Ketua	2	Unit
	- Lemari Buku Kaca Ketua	1	Unit
	- Lemari Bufet	2	Unit
	- Sofa tamu dalam	1	Set
	- Sofa tamu luar	2	Set
	- Lemari toga	1	Unit
	- Sofa bed	1	Unit
	-TV	1	Unit
<b>1. b</b>	<b>Ruang Rapat Ketua</b>	<b>1</b>	<b>Ruangan</b>
	-Meja Rapat	1	Set
	-Kursi Kerja	12	Unit
	-Kursi Besi/Metal	20	Unit
	-TV	1	Unit
<b>2</b>	<b>Ruang Wakil</b>	<b>1</b>	<b>Ruangan</b>
	- Meja Ruang	1	Unit
	- Kursi Kerja	1	Unit

	- Kursi Hadap	2	Unit
	- Lemari Buku Kaca	2	Unit
	- Lemari Bufet	1	Unit
	- Sofa tamu dalam	1	Set
	- Sofa tamu luar	1	Set
	- Lemari toga	1	Unit
	- Sofa bed	1	Unit
	-TV	1	Unit
<b>3. a</b>	<b>Ruang Hakim ( yang terisi 26 ruangan )</b>	<b>30</b>	<b>Ruangan</b>
	- Meja Kerja	30	Unit
	- Kursi Kerja	30	Unit
	- Kursi Hadap	30	Unit
	- Lemari Toga	30	Unit
	-Filling Cabinet	30	Unit
<b>3.b</b>	<b>Ruang Rapat Hakim</b>	<b>1</b>	<b>Ruangan</b>
	-Meja Rapat	4	Unit
	-Kursi Kerja	10	Unit
	-Lemari Arsip Kaca	2	Unit
	-Filling Cabinet	1	Unit
<b>3.c</b>	<b>Ruang Dharmayukti Karini</b>	<b>1</b>	<b>Ruangan</b>
	-Meja	16	Unit
	-Kursi	16	Unit
<b>4</b>	<b>Ruang Panitera</b>	<b>1</b>	<b>Ruangan</b>
	- Meja Kerja	1	Unit
	- Kursi Kerja	1	Unit
	- Kursi Hadap	2	Unit
	- Sofa Tamu	1	Set
	-Lemari Besi	1	Unit
	-Filling Cabinet	1	Unit
	-Brandkas	1	Unit
<b>5</b>	<b>Ruang Sekretaris</b>	<b>1</b>	<b>Ruangan</b>
	- Meja Kerja	1	Unit
	- Kursi Kerja	1	Unit

	- Kursi Hadap	2	Unit
	- Sofa Tamu	1	Set
	-Lemari Arsip Kaca	1	Unit
	-Meja Rapat	1	Unit
	-Kursi Rapat	4	Unit
	-Kursi Panjang	1	Unit
	-Buffet Kecil	1	Unit
	-TV	1	Unit
<b>6</b>	<b>Ruang Sidang Umum</b>	<b>5</b>	<b>Ruangan</b>
	- Meja Sidang Hakim	5	Unit
	- Meja Sidang PP	5	Unit
	- Meja Sidang Tergugat	5	Unit
	- Meja Sidang Penggugat	5	Unit
	- Kursi Sidang Hakim Ketua Majelis	15	Unit
	- Kursi Sidang Hakim Anggota	10	Unit
	- Kursi Sidang PP	5	Unit
	-Kursi Pengunjung sidang	45	Unit
<b>7</b>	<b>R. Sidang Pemeriksaan Persiapan</b>	<b>3</b>	<b>Ruangan</b>
	- Meja Sidang Hakim	3	Unit
	- Meja Sidang PP	3	Unit
	- Meja Sidang Tergugat	3	Unit
	- Meja Sidang Penggugat	3	Unit
	- Kursi Sidang Majelis Hakim	9	Unit
	- Kursi Sidang PP	3	Unit
	- Kursi Sidang Penggugat	6	Unit
	-Kursi Sidang Tergugat	6	Unit
	Kursi Futura	8	Unit
<b>8</b>	<b>Ruang Kepaniteraan ( Panmud Perkara dan Panmud Hukum )</b>	<b>2</b>	<b>Ruangan</b>
	- Meja Kerja	2	Unit
	- Kursi Kerja	2	Unit
	- Kursi Hadap	4	Unit
	- Filing Kabinet	2	Unit

	-Lemari Kayu	2	Unit
<b>9</b>	<b>Ruang Kesekretariatan ( Kasub )</b>	<b>3</b>	<b>Ruangan</b>
<b>a.</b>	<b>Kasub PTIP</b>	<b>1</b>	<b>Ruangan</b>
	- Meja Kerja	5	Unit
	- Kursi Kerja	5	Unit
	- Kursi Hadap	2	Unit
	- Filing Kabinet	2	Unit
	-Lemari Arsip Kaca	5	Unit
<b>b.</b>	<b>Kasub Kepegawaian &amp; Ortala</b>	<b>1</b>	<b>Ruangan</b>
	-Meja Kerja	5	Unit
	-Kursi Kerja	4	Unit
	-Kursi Hadap	2	Unit
	-Lemari Arsip Kaca	7	Unit
	-Filling Cabinet	3	Unit
	-TV	1	Unit
<b>c.</b>	<b>Kasub Umum &amp; Keuangan</b>	<b>1</b>	<b>Ruangan</b>
	-Meja Kerja	7	Unit
	-Kursi Kerja	7	Unit
	-Filling Cabinet	1	Unit
	-Lemari Arsip Kaca	7	Unit
	-Lemari Arsip Besi	1	Unit
	-Brandkas	1	Unit
10	Meja Resepsionis	1	Unit
11	Lemari Arsip Kaca	8	Unit
12	Rak Arsip Besi Siku	80	Unit
13	Kursi Petugas PTSP	7	Unit
14	Kursi Rapat	12	Unit
15	Kursi Tunggu Sidang	25	Unit
16	Meja Kerja JSP dan Staff	22	Unit
17	Kursi Kerja JSP dan Staf	22	Unit
18	Kursi di Media Center	18	Unit
19	Komputer	56	Unit
20	Laptop	23	Unit

21	Printer	50	Unit
22	Scanner	5	Unit
23	Infokus	2	Unit
24	PABX	1	Unit
25	AC Cassete	75	Unit
26	AC Split	20	Unit
27	Genset	1	Unit







**Rumah Dinas**





No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas	1993				
1.1	Ketua	1993			✓	
1.2	Wakil	1993			✓	
1.3	Hakim	1993			✓	
1.4	Hakim	1993			✓	
1.5	Hakim	1992		✓		
1.6	Hakim	1992		✓		



Berikut adalah foto keterangan keadaan rumah dinas :

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta		
No	Rumah Dinas 1 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
1		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumah dinas Ketua PTUN Jakarta,</li> <li>- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,</li> <li>- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, serta langit-langit akan runtuh.</li> <li>• Membahayakan / beresiko difungsikan,</li> <li>• Perbaikan dengan rekonstruksi.</li> </ul> </li> </ul>
		
		
		

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta		
No	Rumah Dinas 2 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
2		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta,</li> <li>- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan yang terdiri dari ;                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atap atap /plafon jebol,</li> <li>• Kusen yang sudah termakan rayap,</li> <li>• Dinding / tembok yang sudah mulai kusam dan rusak</li> <li>• Kaca depan rumah pecah</li> <li>• Pagar roboh</li> </ul> </li> </ul>
		
		
		
		
		

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta		
No	Rumah Dinas 3 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
3		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta,</li> <li>- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,</li> <li>- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak,</li> <li>• Kompenen penunjang lainnya rusak total</li> <li>• Membahayakan / beresiko difungsikan,</li> <li>• Perbaikan dengan rekontrusi.</li> </ul> </li> </ul>
		
		
		
		
		

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta		
No	Rumah Dinas 4 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
4		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumah dinas Wakil Ketua PTUN Jakarta,</li> <li>- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,</li> <li>- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak,</li> <li>• Kompenen penunjang lainnya rusak seperti atap dan pagar</li> <li>• Membahayakan / beresiko difungsikan,</li> <li>• Perbaikan dengan rekontrusi.</li> </ul> </li> </ul>
		

## Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	Altis	2004			✓	
2	Toyota Vios	2009			✓	
3	Proton	2011		✓		
4	Toyota Kijang Kapsul	2003			✓	
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	honda supra x 125D	2007		✓		
2	honda supra x 125D	2007		✓		
3	TIGER GL 200R	2007			✓	Dalam proses penghapusan
4	Honda	2008		✓		
5	Honda	2008		✓		
6	Honda	2008		✓		
7	Honda	2008		✓		
8	Honda	2008		✓		

KENDARAAN DINAS RODA 4				
Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
Toyota Altis		2	Toyota Vios	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toyota Altis 1800 cc</li> <li>- Plat Nomor B 1567 GQ</li> <li>- Merk Toyota</li> <li>- Thn 2004</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toyota Vios 1500 cc</li> <li>- Plat Nomor B 8560 WU</li> <li>- Merk Toyota</li> <li>- Thn 2004</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan</li> </ul>
Proton		4	Toyota Kijang HF 80 LX	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proton 1300 cc</li> <li>- Plat Nomor B 1414 PQ</li> <li>- Merk Proton</li> <li>- Thn 2011</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toyota Kijang Kapsul</li> <li>- Plat Nomor B 7684 JQ</li> <li>- Merk Toyota</li> <li>- Thn 2003</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan</li> </ul>

KENDARAAN DINAS RODA 2				
Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
Honda Tiger CW 200 cc		2	Honda Supra X 125 D	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honda Tiger CW 200 cc</li> <li>- Plat Nomor B 6017 TQA</li> <li>- Merk Honda</li> <li>- Thn 2007</li> <li>- Kondisi Rusak Berat</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honda Supra X 125 D</li> <li>- Plat Nomor B 6016 TQA</li> <li>- Merk Honda</li> <li>- Thn 2007</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan</li> </ul>
Honda Supra X 125 D		4	Honda Supra X 125 D	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honda Supra X 125 D</li> <li>- Plat Nomor B 6018 TQA</li> <li>- Merk Honda</li> <li>- Thn 2007</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honda Supra X 125 D</li> <li>- Plat Nomor B 6391 TQA</li> <li>- Merk Honda</li> <li>- Thn 2008</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan</li> </ul>

No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
5	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honda Supra X 125 D</li> <li>- Plat Nomor B 6392 TQA</li> <li>- Merk Honda</li> <li>- Thn 2008</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan</li> </ul>	6	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honda Supra X 125 D</li> <li>- Plat Nomor B 6393 TQA</li> <li>- Merk Honda</li> <li>- Thn 2008</li> <li>- Kondisi Rusak Berat</li> </ul>
					
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
7	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honda Supra X 125 D</li> <li>- Plat Nomor B 6394 TQA</li> <li>- Merk Honda</li> <li>- Thn 2008</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan</li> </ul>	8	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honda Supra X 125 D</li> <li>- Plat Nomor B 6395 TQA</li> <li>- Merk Honda</li> <li>- Thn 2008</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan</li> </ul>
					

### C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Dalam Mendukung tugas pokok dan Fungsi Pengadilan serta melaksanakan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengintegrasikan teknologi informasi sebagai penunjang utama terhadap kelancaran dan kemudahan pelayanan Publik.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan pelayanan informasi khususnya informasi perkara kepada masyarakat, antara lain :

#### - Implementasi E Court

Implementasi pelaksanaan *e-Court* di PTUN Jakarta, sebagai tindaklanjut :

- a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
- b) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali
- c) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor: 363 /KMA/SK/XII/2022 Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- d) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor: 207 /KMA/SK/X/2023 Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Dan Persidangan kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia secara elektronik.
- e) Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun No 200/Djmt/Sk.Ot1.2/Xi/2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

*E-Court* sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki issue utama dalam *access to justice*. Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tersebut dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor: 207 /KMA/SK/X/2023 tersebut menjadi tonggak dalam revolusi administrasi perkara menuju peradilan modern, Biaya Ringan, Sederhana. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024, PTUN Jakarta telah menerima 484 (Enam Ratus delapan puluh empat) perkara gugatan dan 9 (Sembilan) perkara permohonan Perlawanan secara *e-Court*, baik perorangan (pengguna lain) maupun melalui kuasa hukum/advokat (pengguna terdaftar). Lahirnya aplikasi *e-court* dan *e-litigasi* serta upaya hukum banding elektronik merupakan bentuk respon Mahkamah Agung untuk menghadirkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan yang lebih efektif dan efisien. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkomitmen dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*).

Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan pondasi dari implementasi berperkara secara elektronik di dunia peradilan Indonesia, sehingga peradilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik. Panggilan secara *online*, mengirim dokumen persidangan (jawab, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan penyampaian putusan), Upaya Hukum Banding Elektronik (Permohonan, Akta Banding, Pemberitahuan, Memori, Kontra,

Inzage, dan Putusan banding) Upaya Hukum Kasasi Elektronik (Permohonan, Akta Banding, Pemberitahuan, Memori, Kontra, Inzage, dan Putusan kasasi) secara *online*. Secara substansial, peraturan Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya. *e-Court* merupakan sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online. Aplikasi *e-Court*, *e-litigasi* perkara dan Upaya Hukum Banding Online diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online* dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

#### - Implementasi SIPP

Pelaksanaan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185/Djmt.3/SE/2/2016 tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara. Perkembangan instalasi dan penggunaan SIPP dari versi 3.1.1 di tahun 2016 sekarang sudah dikembangkan versinya menjadi 5.6.4 sehingga aplikasi SIPP bisa terintegrasi dengan aplikasi direktori putusan, e-Court, dan memudahkan penginputan data putusan yang diinput di SIPP bisa langsung masuk ke dalam aplikasi direktori Mahkamah Agung, walaupun ada beberapa **kendala dalam aplikasi SIPP seperti Perkara Perlawanan terhadap Penetapan dismissal, Perkara Gugatan Keterbukaan Informasi**, dengan perkembangan tersebut pimpinan di pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding maupun Mahkamah Agung dapat memonitoring kinerja Hakim dan Panitera/ Panitera Pengganti, dan Jurusita Pengganti serta staf kepaniteraan perkara dalam penginputan data perkara ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

## BAB V

### PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

#### - Akreditasi Penjaminan Mutu

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dengan menjalankan beberapa program yaitu :

1. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1142/DJMT.3/B/9/2017, Perihal Pelaksanaan Akreditasi Tahun Anggaran 2017 tanggal 7 September 2017. maka pada tanggal 19 sd 20 Oktober 2017, Telah dilaksanakan Akreditasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Untuk Pemeriksaan Akreditasi dilaksanakan diruang Rapat Ketua PTUN Jakarta. penilaian terhadap 7 (tujuh) area yang menjadi poin-poin utama assesment. 7 (tujuh) Area tersebut yakni Manajemen Kepemimpinan Dan Sumber Daya Manusia, Pola Bindalmin Dan SOP Penyelesaian Perkara, Sarana Dan Prasarana Pengadilan, Pengelolaan SIPP Dan Aplikasi Berbasis IT Lainnya, Pelayanan Meja Informasi Dan Meja Pengaduan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara, dan Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu diruang Ketua PTUN Jakarta serta Ruangan Kepaniteraan, Kesekretariatan, Hakim, PP dan Posbakum, dari hasil Pemeriksaan dari TIM Assesor Peradilan Tata Usaha Negara Dirjen Badilmiltun, dengan **Hasil Penilaian B**.



2. Kemudian Telah dilaksanakan ulang Hasil Penilaian Akreditasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Dalam kegiatan akreditasi ini terdapat 7 (tujuh) area yang akan dievaluasi, yaitu : Manajemen kepemimpinan dan sumber daya manusia, Pola bindalmin dan SOP penyelesaian perkara, Sarana dan prasarana pengadilan, E Judiciary, Layanan Pengadilan, PNBP dan Survei Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Penilaian tersebut dilakukan selama 2 (dua) Hari Kerja dari tanggal 02 Juli s/d 03 tahun 2019, dengan **Hasil Penilaian A (Excellent)**



3. Prestasi yang telah dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024 yaitu Juara Pertama pada Kategori Inovasi Pelayanan Publik : Aplikasi Jak- Aksi (Aplikasi Eksekusi PTUN Jakarta)





4. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024 Juara Pertama pada Kategori Video Alur Penanganan Perkara di Pengadilan.



5. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berhasil meraih penghargaan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2024 dengan Predikat 'B' yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.



## **B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP )**

Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I. nomor : 462/DJMT/KEP/8/2018 :

### **I. Pasal 11**

Tugas, tanggungjawab, dan kewenangan Pengarah PTSP

1. Menetapkan Pelayanan PTSP yang meliputi semua administrasi peradilan terdiri atas permohonan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, penyerahan/pengambilan produk pengadilan, dan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengangkat Pejabat Pengelola, Penanggung jawab dan Petugas PTSP.
3. Mensosialisasikan PTSP kepada Seluruh Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
4. Memberikan Pengarahan kepada Pejabat Pengelola, Penanggung Jawab dan Petugas PTSP.
5. Mengawasi dan mengevaluasi Pelaksanaan PTSP.

### **II. Pasal 12**

Tugas, tanggungjawab, dan kewenangan Pejabat Pengelola PTSP

1. Membuat meja pelayanan terpadu, menyediakan sarana / prasarana sesuai kebutuhan sejumlah Panitera Muda yang ada pada Kepaniteraan dan Sub Bagian pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
2. Menyelenggarakan PTSP secara efektif, efisien dan akuntabel.
3. Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan, Pejabat Teknis dan Non Teknis agar pengelolaan PTSP dapat berjalan baik.
4. Pengelola PTSP dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab kepada Pengarah PTSP.

### III. Pasal 13

Tugas, tanggungjawab, dan kewenangan Penanggungjawab PTSP

1. Membantu Pengelola PTSP dalam mengelola pelayanan pengadilan yang dilaksanakan oleh Petugas PTSP.
2. Penanggung jawab PTSP bertanggungjawab kepada Pengelola PTSP.
3. Membimbing dan membina Petugas PTSP, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas maupun pelaksanaan tugas PTSP.

### IV. Pasal 15

Tugas, tanggungjawab Petugas PTSP

1. Petugas Kepaniteraan Muda Perkara bertugas melayani :
  - Menerima Pendaftaran Perkara Gugatan.
  - Menerima Pendaftaran Permohonan.
  - Menerima Pendaftaran Perlawanan.
  - Menerima Pendaftaran Permohonan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.
  - Menerima memori / kontra memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
  - Menerima Permohonan Sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali.
  - Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.
  - Menerima permohonan dan pengambilan turunan putusan.
  - Menerima pendaftaran permohonan pengawasan eksekusi.
  - Menerima permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.
  - Menerima Permohonan sebagai Kuasa Insidentil.
  - Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.

2. Petugas Kepaniteraan Muda Hukum bertugas melayani :
  - Surat Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara Tata Usaha Negara.
  - Permohonan surat izin kepada Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset.
  - Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
  - Permohonan pendaftaran surat kuasa.
  - Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di Pengadilan.
  - Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.
  - Penanganan pengaduan / SIWAS-MARI.
  - Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.
3. Petugas Kesekretariatan (Sub Bagian Umum dan Keuangan) bertugas :
  - Menerima dan menyerahkan seluruh surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
4. Petugas Pelayanan Persidangan bertugas :
  - Memberikan informasi dan pelayanan persidangan kepada para pihak / masyarakat pencari keadilan.
5. Petugas PTSP bertanggung jawab kepada Pengelola PTSP.
6. Petugas E Court Corner bertugas :
  - a. Pendaftaran E-Court Datang Ke Pengadilan
    - Menerima Gugatan E Court, yang sudah diverifikasi oleh Meja 1;
    - Memberitahukan kepada Meja 1 dan Kasir ;
    - Menginput data Para Pihak dan Data Umum pada Aplikasi SIPP;
    - Membuat User & Password Tergugat di Aplikasi E Court;
    - Membuat User Pengguna Lain di Aplikasi E Court ( Non Advokat ) ;
    - Menginput Dokumen Intervensi pada Aplikasi E Court ;

- Menerima Pendaftaran Advokat terdaftar;
  - Membantu pelaksanaan teknis persidangan secara E Court;
  - Konsultasi tentang penggunaan Aplikasi E Court;
- b. Pendaftaran E-Court tidak Ke Pengadilan
- Menerima Gugatan E Court, dari Aplikasi E Court;
  - Mencetak dan Memberitahukan kepada Meja 1 dan Kasir ;
  - Menginput data Para Pihak dan Data Umum pada Aplikasi SIPP;
  - Membantu pelaksanaan teknis persidangan secara E Court.

### **Prosedur, Jam Layanan dan Pengaturan Meja PTSP pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**

#### **I. PROSEDUR PTSP SEBAGAI BERIKUT :**

1. Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan.
2. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan.
3. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke Kepaniteraan/Kesekretariatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan.

#### **II. JAM LAYANAN PTSP SEBAGAI BERIKUT :**

1. Senin s.d. Kamis : Pukul 08.30 s.d. 15.00 WIB
2. Jumat : Pukul 08.30 s.d. 15.30 WIB

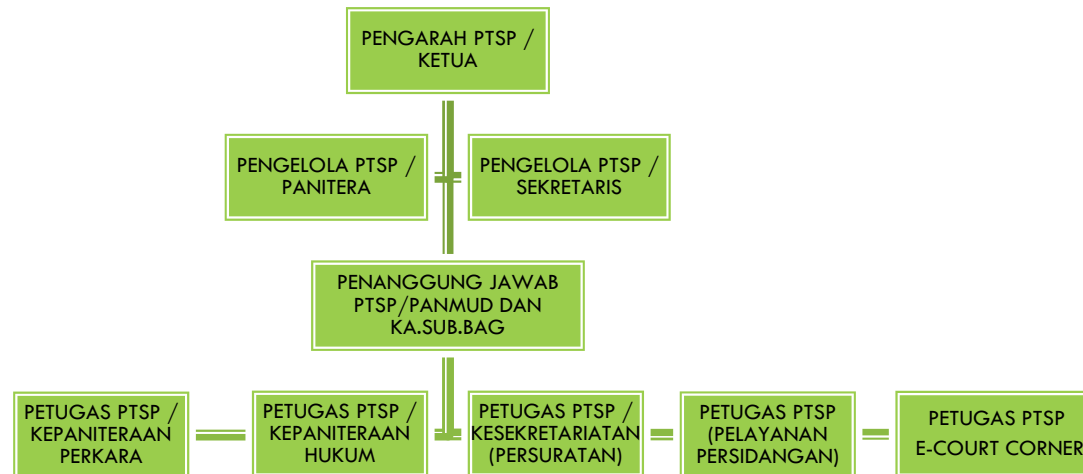
#### **III. PENGATURAN MEJA PTSP SEBAGAI BERIKUT :**

1. Meja PTSP ditempatkan pada loby yang menghadap pintu masuk, namun jika tidak memungkinkan agar disesuaikan dengan kondisi ruang Pengadilan, yang dilengkapi kursi-kursi untuk pemohon.
2. Bentuk dan ukuran meja PTSP harus memudahkan pemberian layanan bagi pemohon, termasuk penyandang disabilitas.

3. Di atas meja PTSP harus tersedia komputer, formulir pengaduan dan buku regsiter pengaduan, formulir dan buku register permohonan informasi, dan brosur yang berisi tentang layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.
4. Tulisan PTSP dipasang di dinding belakang/backdrop PTSP.
5. Panjang meja PTSP disesuaikan dengan jumlah layanan Kepaniteraan dan Bagian/Sub Bagian pada Kesekretariatan yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
6. Pada setiap ruangan layanan agar disediakan kursi untuk pengunjung/pengguna Layanan PTSP yang mengantre atau menunggu.



## STRUKTUR ORGANISASI PTSP PENGADILAN TATA USAHA NEGARA





**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**  
NOMOR : 2254 /KPTUN.W2.TUN.1/OT1.1/VIII/2024

**TENTANG**

**PERUBAHAN PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa transparansi dan pelayanan publik merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan Badan Peradilan dibawahnya;  
b. Bahwa untuk memberikan pelayanan publik secara baik dan memberikan informasi secara transparansi, maka perlu dibentuk Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;  
c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;  
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;  
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan;  
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;  
10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;  
11. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;  
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan ;  
13. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 462/DJMT/KEP/8/2018, tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA;
- KESATU :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 377/KPTUN.W2.TUN.1/OT1.1/1/2024 Tentang Perubahan Petugas Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEDUA :** Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KETIGA :** Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Petugas Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan setiap kegiatan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Pejabat lainnya yang terkait;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya;
- SALINAN :** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta.  
Pada Tanggal : 13 Agustus 2024.

KETUA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA,  
  
BOENOEN PRATIWI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
 NOMOR : 3522 /KPTUN.W2.TUN.1/PW.1.1/XI/2024  
 TANGGAL : 22 NOVEMBER 2024

**DAFTAR NAMA KOORDINATOR DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG  
 KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN  
 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	DITUNJUK SEBAGAI
1	YARWAN, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	KOORDINATOR HAKIM PENGAWAS BIDANG
<b>I. HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN</b>			
1	LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum	HAKIM	SURAT KUASA
2	HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.	HAKIM	BERKAS IN AKTIF
3	HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.	HAKIM	KEUANGAN PERKARA
4	Dr.NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.	HAKIM	BUKU REGISTER
5	RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.	HAKIM	LAPORAN PERKARA
6	FILDY, S.H., M.H.	HAKIM	INFORMASI DAN PENGADUAN, WBS, GRATIFIKASI, SERTA BENTURAN KEPENTINGAN
7	DIKDIK SOMANTRI, S.H., M.H.	HAKIM	PENINJAUAN KEMBALI
8	HARISTOV ASZADHA, S.H.	HAKIM	POSBAKUM
9	GANDA KURNIAWAN, S.H.	HAKIM	PERKARA BANDING
10	IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.	HAKIM	EKSEKUSI
11	MOHAMMAD HERRY INDRAWAN PATIRADJA, S.Sos., S.H., M.H.	HAKIM	SIPP
12	GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.	HAKIM	PERKARA KASASI
13	FEBRINA PERMADI, S.H., M.H.	HAKIM	PTSP
<b>II. HAKIM PENGAWAS BIDANG KESEKRETARIATAN</b>			
1	FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.	HAKIM	KEBERSIHAN
2	YUSTAN ABITHOYIB, S.H.	HAKIM	KEUANGAN
3	YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.	HAKIM	PERENCANAAN
4	ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.	HAKIM	PELAPORAN
5	ANDI FAHMI AZIS, S.H.	HAKIM	IT (WEBSITE)
6	DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.	HAKIM	KEAMANAN
7	NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, S.H., M.H.	HAKIM	PERPUSTAKAAN & PERSURATAN
8	ARIFUDDIN, S.H., M.H.	HAKIM	PERLENGKAPAN & INVENTARISIR
9	GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.	HAKIM	KEPEGAWAIAN & ORTALA

KETUA  
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA,



### C. Inovasi Pelayanan Publik

Modernisasi peradilan melalui inovasi teknologi informasi merupakan kontribusi lembaga peradilan untuk menjalankan mandat dalam rangka mendukung kemudahan berusaha (*Esay of Doing Business*). Bahwa aparaturnya pengadilan tidak hanya dituntut penguasaan ilmu hukum tetapi juga harus menguasai teknologi informasi, dan merubah paradigma pelayanan *one to one* menjadi *one to many*. PTUN Jakarta sebagai peradilan modern berbasis teknologi informasi dapat terwujud apabila terlebih dahulu membangun perangkatnya baik SDM nya maupun infrastrukturnya.

Proses pemeriksaan perkara terlambat maka proses pemberian rasa keadilan akan terhambat, sehingga tidak tercapai asas berperkara sederhana, cepat dan biaya ringan. Semua dapat tercapai apabila saling bekerjasama, apabila bekerja sendiri-sendiri maka pelaksanaan tugas dan fungsi tidak akan maksimal. Oleh karena itu, PTUN Jakarta membuat inovasi yaitu **SI PITUNG (Sistim Pelayanan Informasi Terpadu Unggulan)**, *new e-visitor* (buku tamu), *Aplikasi Jak-Aksi* (aplikasi Eksekusi) dan **Aplikasi E-Case Files** berbasis Teknologi Informasi (TI).

Berikut inovasi yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

#### 1. **Aplikasi SI PITUNG versi 3 (Sistim Pelayanan Informasi Terpadu Unggulan)**

PTUN Jakarta sebagai peradilan modern berbasis teknologi informasi pada awalnya belum memiliki aplikasi pelayanan chatbot Whatsapp sebagai Informasi pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat terkait persidangan. PTUN Jakarta melakukan inovasi berbasis teknologi informasi dengan optimalisasi media informasi dan pelayanan secara digital melalui pengembangan aplikasi layanan chatbot Whatsapp yang terintegrasi dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

PTUN Jakarta saat ini telah menggabungkan inovasi SIPITUNG dengan Aplikasi CERIA (Sistem Cepat Respon Informasi Administrasi). Dalam rangka memudahkan informasi yang disajikan kepada Masyarakat pencari informasi maka Ketua PTUN Jakarta mengambil kebijakan untuk menggabungkan kedua

aplikasi tersebut. Untuk informasi yang bisa di akses terbagi dua yaitu Informasi Persidangan dan Informasi Layanan Kepaniteraan.



Inovasi aplikasi **SI PITUNG versi 3 (Sistim Pelayanan Informasi Terpadu Unggulan)** penerapannya di PTUN Jakarta merupakan pengembangan dari aplikasi chatbot Whatsapp yang terintegrasi dengan SIPP. Aplikasi Chatbot Whatsapp tersebut sepenuhnya optimal dalam memberikan informasi terkait perkara yang disidangkan di PTUN Jakarta kepada masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang cepat, valid dan dapat dipercaya terutama bagi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari PTUN Jakarta. Informasi layanan secara digital diperlukan sehingga optimalisasi aplikasi layanan chatbot Whatsapp dengan melakukan pengembangan baik dalam responsibilitas, publikasi dan data informasi.

Berikut tampilan inovasi **Aplikasi SI PITUNG (Sistim Pelayanan Informasi Terpadu Unggulan)**.



Untuk pencarian informasi pada aplikasi sipitung versi 3 harus menggunakan kata kunci Panduan dan info. **Ketik Info** Untuk Informasi Persidangan dan **Ketik Panduan** untuk Informasi Layanan Kepaniteraan.



Berikut informasi dari kata kunci dari **panduan** :

1. Informasi Kepaniteraan Perkara : informasi perkara
2. Informasi Kepaniteraan Hukum : informasi hukum

Berikut Informasi dari kata kunci **Info** :

1. Jadwal sidang mendatang
2. Biaya perkara
3. Informasi perkara
4. Informasi putusan
5. Informasi banding
6. Informasi kasasi
7. Informasi peninjauan kembali
8. Informasi eksekusi
9. Pemberitahuan sidang h-1

## 2. *New e-visitor* versi 2 (Buku Tamu)

Inovasi PTUN Jakarta sebagai peradilan modern berbasis teknologi informasi yang kedua selanjutnya diberi nama *new e-visitor* (buku tamu). PTUN Jakarta pada awalnya sudah memiliki aplikasi *e-visitor* (buku tamu) sebagai Informasi pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat terkait persidangan. PTUN Jakarta selanjutnya melakukan inovasi dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan manajemen pelayanan pada pengadilan sangat dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan bermutu.

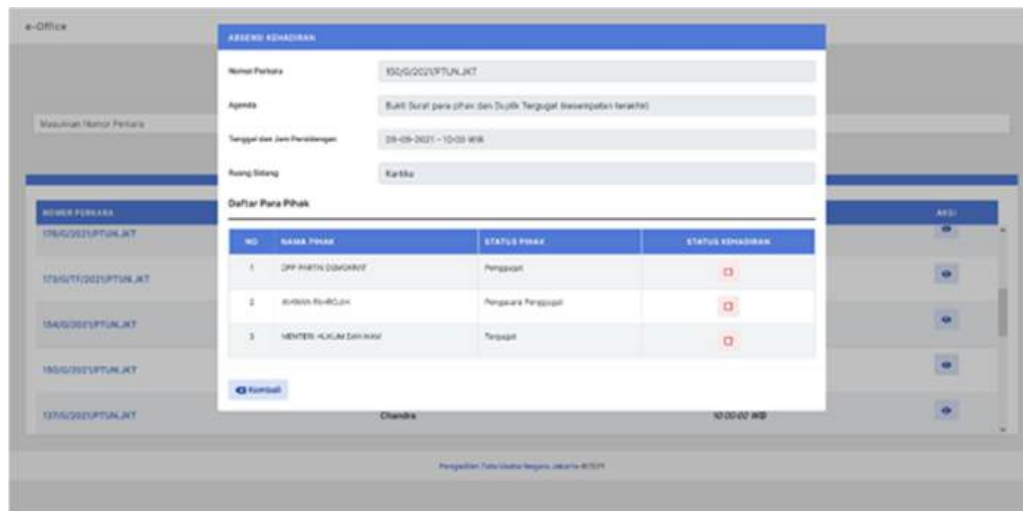
PTUN Jakarta dengan inovasinya melakukan pengembangan dari inovasi aplikasi *e-visitor* telah diperbaharui menjadi *new e-visitor* (buku tamu) sehingga dapat mencakup kebutuhan manajemen pelayanan buku tamu yang terintegrasi dengan layanan PTSP dan persidangan. Inovasi *new e-visitor* (buku tamu) mendukung inovasi yang sudah ada sebelumnya yaitu inovasi aplikasi *e-visitor*. Inovasi *new e-visitor* (buku tamu) mendukung inovasi yang sudah ada sebelumnya dan terintegrasi dengan layanan PTSP dan SIPP persidangan.

Inovasi *new e-visitor* (buku tamu) penerapannya di PTUN Jakarta merupakan pengembangan dari aplikasi *e-visitor* (buku tamu) yang terintegrasi dengan layanan PTSP dan SIPP persidangan. Aplikasi *new e-visitor* (buku tamu) merupakan instrumen/alat bantu yang diperlukan dalam menunjang kinerja PTUN Jakarta untuk lebih baik lagi dalam melayani masyarakat.

Dengan menggunakan fitur barcode masyarakat bisa menggunakan smartphone dapat memilih bentuk layanan yang diinginkan.

Berikut tampilan inovasi **Aplikasi New e-visitor (Buku Tamu)**.

Tampilan absensi kehadiran para pihak



Barcode Absensi



### Kehadiran pihak yang sudah lengkap

DETIL KEHADIRAN PIHAK

Nomor Perkara: 150/G/2021/PTUN.JKT

Agenda: Bukti Surat para pihak dan Duplik Tergugat (kesempatan terakhir)

Tanggal dan Jam Persidangan: 09-09-2021 - 10:00 WIB

Ruang Sidang: Kartika

**Daftar Para Pihak**

NO	NAMA PIHAK	STATUS PIHAK	STATUS KEHADIRAN
1	DPP PARTAI DEMOKRAT	Penggugat	<input checked="" type="checkbox"/>
2	BHIMAN FAHROJH	Pengacara Penggugat	<input checked="" type="checkbox"/>
3	MENTERI HUKUM DAN HAM	Tergugat	<input checked="" type="checkbox"/>

[← Kembali](#)

### Monitoring Ruang Persidangan

Monitoring Persidangan Monitoring Persidangan > List Monitoring Persidangan

150/G/2021/PTUN.JKT  
R. Kartika

RUANG SIDANG KOSONG  
R. Chandra

RUANG SIDANG KOSONG  
R. Citra

RUANG SIDANG KOSONG  
R. Tita

RUANG SIDANG KOSONG  
R. Sari

ANTRIAN PERSIDANGAN

NO.	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK	STATUS	AKSI
1	150/G/2021/PTUN.JKT	Penggugat: DPP PARTAI DEMOKRAT Tergugat: MENTERI HUKUM DAN HAM	Hadir	

### Buku Tamu Non Persidangan

NO	NAMA	PEKERJAAN	KEPERLUAN	FILE KTP	STATUS	TANGGAL HADIR	AKSI
1	Taufiq Sahargo	TM/Point	Menemui Panitera	File Rangkap	Sudah Kemas	10 Januari 2025	[+][✓][✖]
2	ROSI IRWANDI	Pelajar/Mahasiswa	Lain-lain	File Rangkap	Sudah Kemas	03 Januari 2025	[+][✓][✖]
3	ROSI IRWANDI	Pelajar/Mahasiswa	Menemui Sekretaris	File Rangkap	Sudah Kemas	02 Januari 2025	[+][✓][✖]
4	Behder Johan	Advocat	Menemui Sekretaris	File Rangkap	Sudah Kemas	27 Desember 2024	[+][✓][✖]
5	Deny Sapetra	Wiraswasta	Lain-lain	File Rangkap	Sudah Kemas	19 Desember 2024	[+][✓][✖]
6	Rio Agustin	Pelajar/Mahasiswa	Lain-lain	File Rangkap	Sudah Kemas	16 Desember 2024	[+][✓][✖]
7	ROSI IRWANDI	Pelajar/Mahasiswa	Menemui Sekretaris	File Rangkap	Sudah Kemas	05 Desember 2024	[+][✓][✖]
8	MUHAMAD SYAHBUDIN	Lain-lain	Menemui Panitera	File Rangkap	Sudah Kemas	05 Desember 2024	[+][✓][✖]
9	Iham, togar.	Lain-lain	Lain-lain	File Rangkap	Sudah Kemas	04 Desember 2024	[+][✓][✖]
10	Denis	Lain-lain	Lain-lain	File Rangkap	Sudah Kemas	03 Desember 2024	[+][✓][✖]

### Buku Tamu Pelayanan

NO	NAMA	JENIS PELAYANAN	TANGGAL PELAYANAN	PELAYANAN	AKSI
1	JIMI PATWA	Meja Pojok e-Court	09 Januari 2025	Sudah	[+][✓][✖]
2	Jihan Fauziah Hamdi	Meja Pojok e-Court	09 Januari 2025	Sudah	[+][✓][✖]
3	TONI HARTONO	Meja Pojok e-Court	09 Januari 2025	Sudah	[+][✓][✖]
4	MARYATI GURNING	Meja Pojok e-Court	09 Januari 2025	Sudah	[+][✓][✖]
5	Adit	Meja Pojok e-Court	09 Januari 2025	Sudah	[+][✓][✖]
6	Muhammad Daud Berueh	Meja 1	08 Januari 2025	Sudah	[+][✓][✖]
7	RUTH ASTITI	Meja Pojok e-Court	08 Januari 2025	Sudah	[+][✓][✖]
8	ALBERT KAREL BURWOS	Meja Informasi	08 Januari 2025	Sudah	[+][✓][✖]
9	M Fauzy Lucky Akbar	Meja Pojok e-Court	08 Januari 2025	Sudah	[+][✓][✖]
10	Aditya Putra	Meja Pojok e-Court	08 Januari 2025	Sudah	[+][✓][✖]

## Survey IKM

Survei IKM

Survei IKM > List Survei IKM

LIST SURVEI IKM

ID: -

NO	JENIS KELAMIN	USA	PENDIYAK	PEKERJAAN	JENIS LAYANAN	AKSI
1	Laki - Laki	20	33	PNB	Perdagangan PTSP	<a href="#">+</a> <a href="#">-</a> <a href="#">x</a>

Page 1 of 1

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN)

## Survey IPAK

Survei IPAK

Survei IPAK > Survei IPAK

LIST SURVEI IPAK

ID: -

NO	JENIS KELAMIN	USA	PENDIYAK	PEKERJAAN	JENIS LAYANAN	AKSI
1	Laki - Laki	25	33	Arts and	Banking	<a href="#">+</a> <a href="#">-</a> <a href="#">x</a>
2	Perempuan	18	33	IND	Perdagangan PTSP	<a href="#">+</a> <a href="#">-</a> <a href="#">x</a>

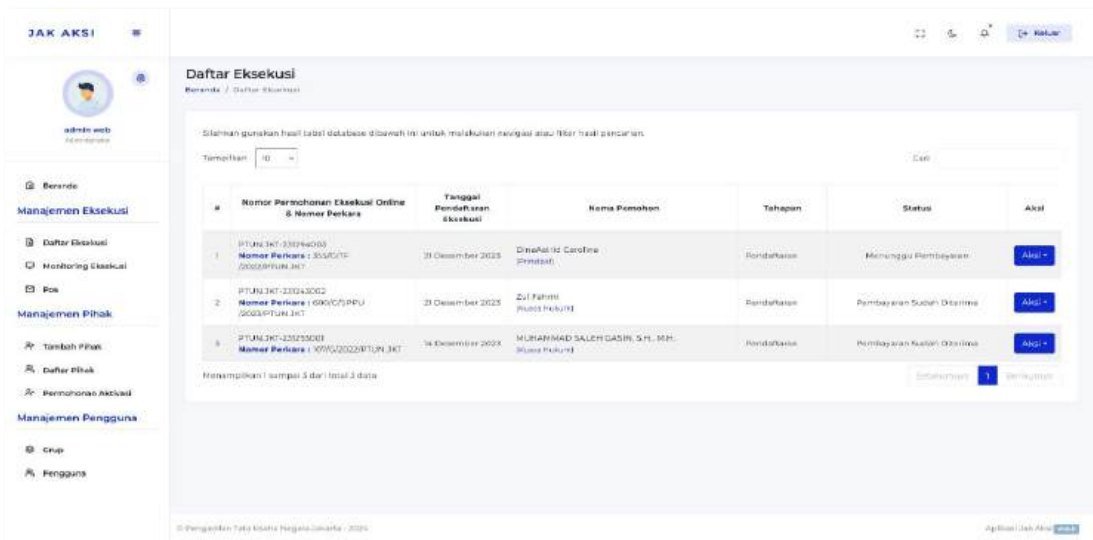
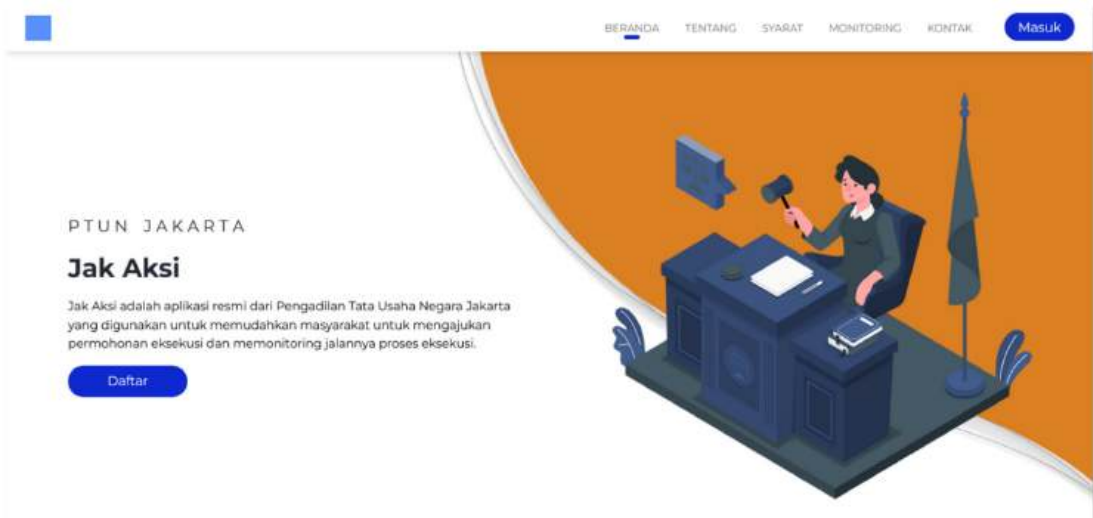
Page 1 of 2

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN)

### 3. Aplikasi Jak Aksi

Jak Aksi adalah aplikasi resmi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang digunakan untuk memudahkan masyarakat untuk mengajukan permohonan eksekusi dan memonitoring jalannya proses eksekusi.

Aplikasi Jak – Aksi adalah inovasi terbaru Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. pada hari Jumat, 23 Juni 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menggelar Acara Launching Aplikasi Jak – Aksi Versi 1 (Aplikasi Eksekusi PTUN Jakarta). Acara ini di hadiri oleh YM. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H (Hakim Agung Kamar TUN), Dr. H. Hari Sugiharto, S.H. M.H. (Direktur Binganismin Dil TUN), H. Oyo Sunaryo,S.H., M.H (KPT TUN Jakarta).



### Alur Aplikasi Eksekusi (JAK-AKSI)

- Untuk mengajukan eksekusi, pengguna (Pemohon) harus memilih menu permohonan eksekusi. Kemudian mengisi data jenis pemohon serta nomor perkara dan pada menu pihak dipilih sebagai penggugat apabila sebagai pemohon.

The screenshot shows the 'Formulir Pengajuan Eksekusi' interface. On the left is a sidebar with 'Manajemen Eksekusi' and 'Permohonan Eksekusi' options. The main form area contains:
 

- Jenis Pemohon \***: Radio buttons for 'Prinsipal' (selected) and 'Kuasa Hukum'.
- Nomor Perkara**: A text input field containing '300/0/2020/PTUN.JKT'.
- Pihak**: A dropdown menu showing 'Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Diwakili Oleh: Prof. Dr. Mochtar Pakpahan, SH/MAJ (Penggugat)'.
- A blue 'Selanjutnya' button at the bottom.

- Kemudian pilih menu selanjutnya. Pengguna aplikasi bisa mengupload data dokumen permohonan eksekusi (Tidak wajib di isi, hanya untuk perkara yang sudah lama) dan dokumen Putusan yang sudah BHT. Eksekusi yang dapat dilaksanakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara hanya Putusan yang mempunyai nilai eksekusi saja.

This screenshot shows the same form but with document upload options. The fields are:
 

- Dokumen Permohonan Eksekusi \***: A 'Browse...' button with 'No file selected' below it.
- Dokumen Putusan \***: A 'Browse...' button with 'No file selected' below it.
- A blue 'Kembali' button on the bottom left.
- A blue 'Selanjutnya' button on the bottom right.

- Pengadilan akan memeriksa nomor perkara yang diajukan oleh pemohon. Apabila data pemohon eksekusi diyantakan valid, pemohon bisa melanjutkan dengan membayar panjar eksekusi sebesar Rp. 600.000 melalui fitur pembayaran (e-payment). Pemohon diwajibkan untuk mengisi form pembayaran dan mengupload bukti pembayaran. Kemudian kasir akan mencocokkan data pembayaran pemohon melalui rekening Bank Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan akan mengonfirmasi bahwa pembayaran sudah di terima melalui aplikasi.

**Pembayaran (e-Payment)**

Bukti Pembayaran	: <a href="#">Lihat Bukti Pembayaran</a>
Diterima Dari	: [Nomer Rekening : 123123123123123] - [Pada Bank : BANK BRI] - [A.n : Joni]
Bank & Nomor Rekening Pembayaran	: BANK BRI - 01220100912302
Nama Rekening Pembayaran	: RPL 175 PTUN Jakarta
Panjar Perkara	: Rp. 600.000
Status Pembayaran	: Pembayaran Sudah Diterima
Tanggal Pembayaran	: Selasa, 30 Mei 2023 12:00 WIB

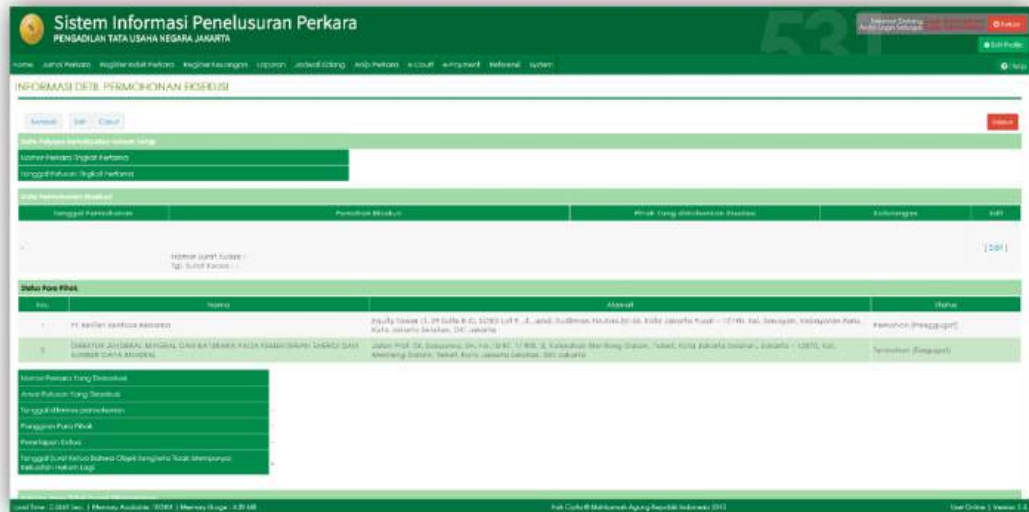
- Petugas Eksekusi (meja 1) Memasukan data Keuangan di jurnal pengawasan eksekusi di aplikasi SIPP Lokal

The screenshot displays the SIPP application interface for adding an execution request. The form includes the following fields and controls:

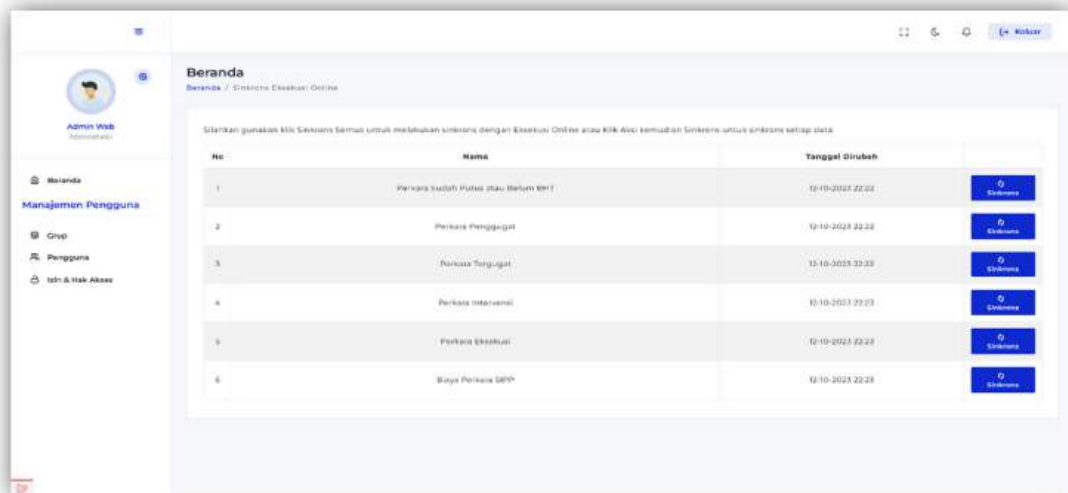
- Daftar/Detail Data Sistem Regime**: A dropdown menu.
- Referensi Perkara**: A text input field with a search icon and a 'Cari' button.
- Daftar/Detail Rekening**: A dropdown menu.
- Kategori yang Didukung**: A dropdown menu.
- Referensi Perkara yang di Eksekusi**: A text input field.
- Kasir/Petugas yang di Eksekusi**: A dropdown menu.
- Tanggal Permohonan Eksekusi**: A date selection field.
- Nilai Permohonan**: A text input field with a 'Cari' button.
- Referensi Permohonan**: A dropdown menu.
- Affected Perkara**: A dropdown menu.
- Tanggal Surat Eksekusi**: A date selection field.
- Rekening Surat Eksekusi**: A dropdown menu.
- Daftar yang Dimasukkan ke dalam**: A dropdown menu.
- Petugas**: A dropdown menu.
- Tanggal**: A date selection field.

At the bottom of the form, there are 'Simpan' and 'Batal' buttons. The footer of the application shows the date '2023 Sen, 05:00:00', the user 'User: Admin', and the version '1.0.0.0'.

- Petugas Eksekusi (meja 1) Memasukkan data di register pengawasan eksekusi TUN



- Petugas Eksekusi (meja 1) melakukan proses sinkronisasi Server melalui aplikasi JAK aksi dengan Alamat [http://192.168.1.210/sinkrons\\_eksekusi](http://192.168.1.210/sinkrons_eksekusi)



### A. Proses eksekusi

1. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja KPTUN memerintahkan Panitera untuk memberitahukan Putusan BHT (Mempunyai Nilai Eksekusi) dan Surat penetapan pemanggilan para pihak. Untuk pemberitahuan Putusan dan Surat penetapan pemanggilan para pihak akan di kirimkan melalui jasa pengiriman pos indonesia kepada para pihak. Untuk pemanggilan para pihak akan di jadwalkan 10

hari kepada pemohon dan termohon eskekusi datang ke pengadilan setelah dokumen sampai di alamat penerima. Jurusita akan memasukan data resi POS dan akan melacak kiriman untuk memastikan salinan telah diterima oleh tergugat melalui fitur tracking POS yang sudah terintegrasikan secara otomatis apabila dokumen pengiriman telah sampai ke alamat penerima.

**Tambah Perintah/Penetapan**

Silakan isi informasi di bawah ini. Label yang ditandai dengan \* adalah kolom input yang diperlukan.

Jenis Perintah/Penetapan \*  
 KPTUN memerintahkan Panitera untuk memberitahukan Putusan BHT dan Panggilan kepada Para Pihak

Tanggal Perintah/Penetapan \*  
 10 Juli 2024

Dokumen \*  
 Browse... No file selected.  
 File yang diupload harus extension .pdf dan Maksimal 10 MB

Keterangan

Simpan

**PTUN JAKARTA**

**Tambah Pos**  
 Beranda / Pos / Tambah Pos

Silakan isi informasi di bawah ini. Label yang ditandai dengan \* adalah kolom input yang diperlukan.

Nama \*

Nomor Perkara \* Perihal \*

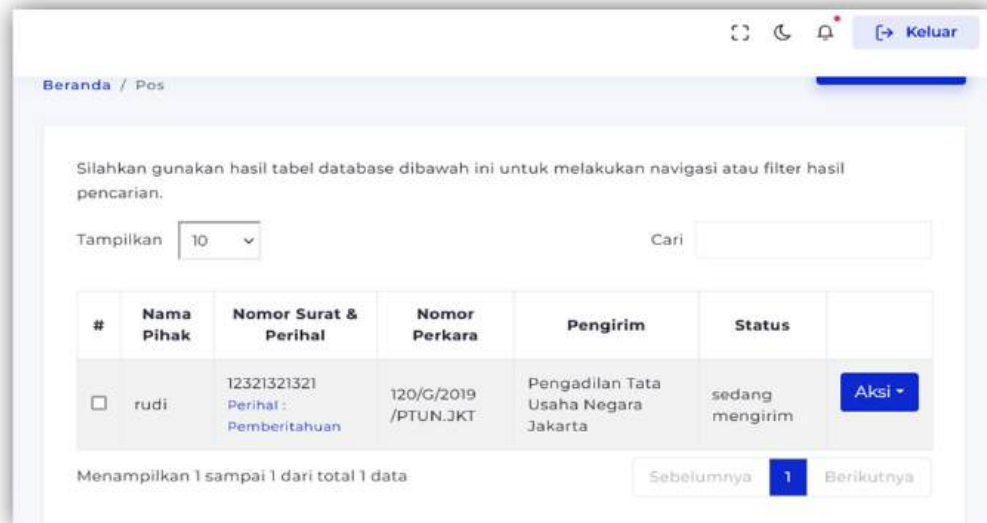
Nomor Surat \* Pengirim \*  
 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor Resi \* Dokumen \*  
 Browse... No file selected.

Keterangan

Kembali Simpan

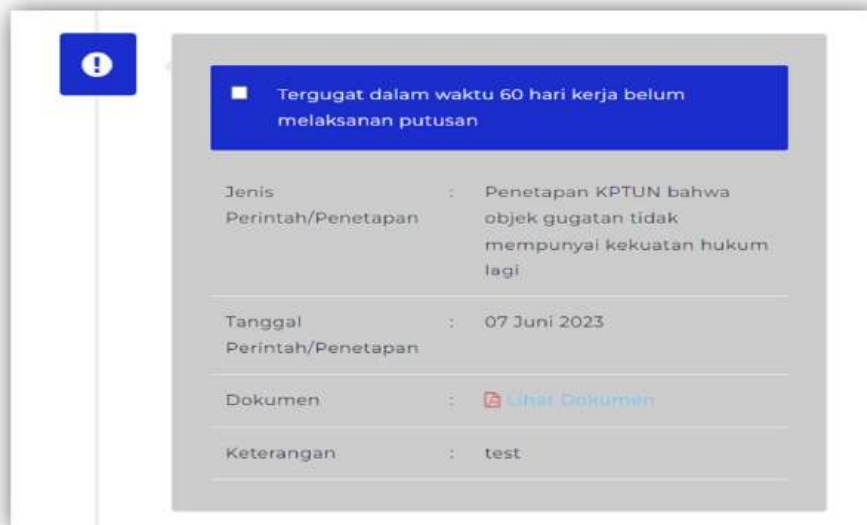
- Juru sita atau Petugas yang ditunjuk pengadilan akan memeriksa status pengiriman pos melalui aplikasi.



- Setelah para pihak datang ke Pengadilan untuk di mintakan keterangan oleh KPTUN. Termohon diarahkan ke Petugas PTSP (Meja 1) untuk dibuatkan akun pada aplikasi Jak-aksi. Dalam tahapan ini petugas eksekusi (Meja 1) akan membuat akun dan mengaktifasi akun Tergugat (Termohon Eksekusi) pada aplikasi eksekusi setelah mendapatkan alamat domisili elektronik (E-mail) Tergugat. Dengan dibuatkan akun untuk tergugat dan terdaftar dalam aplikasi eksekusi proses pengawasan.
- Di hari yg sama dengan kehadiran para pihak dan Tergugat belum melaksanakan Putusan, KPTUN membuat penetapan melaksanakan Putusan sesuai dengan pasal 64 dan 66 UUAP an diupload di aplikasi jak- aksi. Jurusita akan mengirim pemberitahuan penetapan melalui fitur aplikasi e-Summons kepada para pihak. Tergugat diberikan batasan waktu untuk melaksanakan Putusan selama 21 hari kerja.

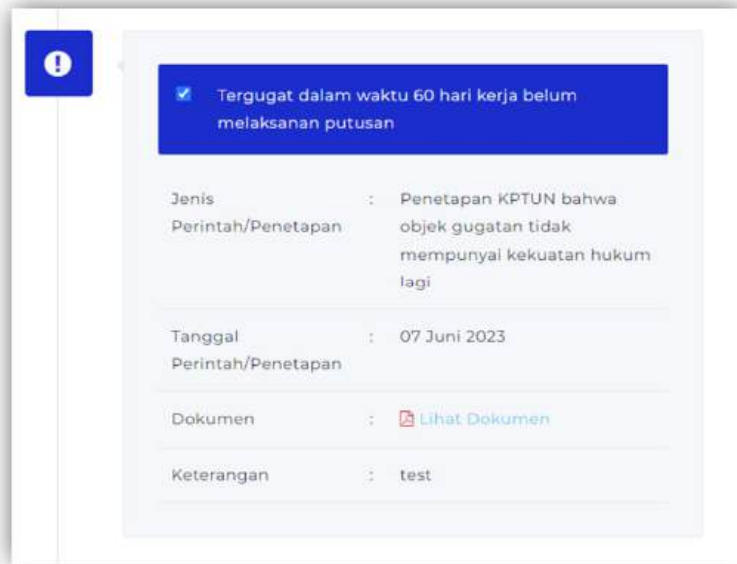


5. Dalam waktu 60 hari kerja akan muncul secara otomatis wadah untuk Penggugat untuk memberikan pernyataan Tergugat belum melaksanakan Putusan dengan mengisi/mencentang kolom ceklist pada aplikasi eksekusi. untuk pelaksanaan eksekusinya terhitung pada saat pengiriman pos sampai di tujuan.



6. Apabila kolom ceklist sudah di centang oleh pemohon. Maka akan muncul timeline Penetapan KPTUN bahwa objek gugatan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi yang berubah menjadi warna cerah. KPTUN akan membuat penetapan bahwa objek gugatan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila Tergugat dalam waktu 60 hari belum melaksanakan Putusan,

maka objek gugatan sebagaimana Pasal 97 (9) huruf a tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Atas perintah Panitera, Jurusita mengirimkan penetapan KPTUN tentang objek gugatan tidak mempunyai kekuatan hukum kepada para pihak melalui fitur e-Summons.



- Setelah 90 hari kerja tergugat tidak melaksanakan Putusan sebagaimana Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c. Ketua Pengadilan akan memerintahkan Panitera agar memanggil Para Pihak untuk di mintakan keterangan. Atas perintah Panitera, Jurusita mengirimkan penetapan pemanggilan para pihak kepada tergugat melalui fitur e-Summons Apabila tergugat belum melaksanakan Putusan setelah di mintakan keterangan.

Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan Putusan pengadilan tersebut. Penggugat bisa mengupload dokumen permohonan pada wadah yang akan tampil setelah 90 hari kerja. Dokumen permohonan terlebih dahulu akan di verifikasi oleh pengadilan.

Permohonan Penggugat Agar Pengadilan Memerintahkan Tergugat Melaksanakan Putusan Sebagaimana Dimaksud Pasal 116 ayat (3) UU PERATUN

[PERMOHONAN\\_PENGGUGAT\\_1693227623.pdf](#)  
 Verifikasi Dokumen Permohonan  
**Diverifikasi Tanggal : (28 Agustus 2023 22:20)**

Jenis Perintah/Penetapan : Pemanggilan Para Pihak oleh Ketua Pengadilan

Tanggal Perintah/Penetapan : 13 September 2023

Dokumen : [Lihat Dokumen](#)

Dihadiri Oleh : Tergugat Saja

8. Setelah dokumen permohonan sudah di verifikasi. Proses selanjutnya KPTUN akan membuat penetapan Eksekusi untuk memerintahkan tergugat melaksanakan Putusan. Atas perintah Panitera, Jurusita mengirimkan penetapan kepada tergugat melalui fitur e-Summons.

Jenis Perintah/Penetapan : Penetapan Eksekusi

Tanggal Perintah/Penetapan : 06 Oktober 2023

Dokumen : [Lihat Dokumen](#)

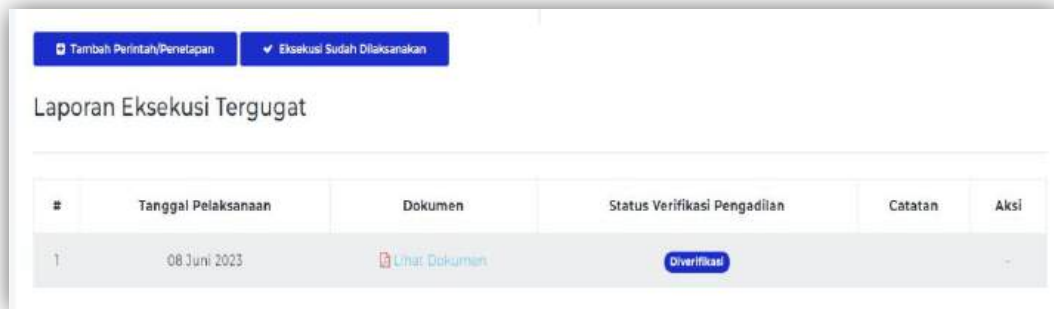
9. Apabila tergugat tidak melaksanakan Putusan. Penggugat memohon kepada pengadilan untuk di umumkan melalui media massa, media massa elektronik dan/atau website pengadilan. Penggugat terlebih dahulu membayar biaya sesuai dengan media yang akan digunakan. Penggugat memberitahukan kepada Panitera terkait media apa yang akan digunakan untuk mengumumkan berita eksekusi.



10. Ketua Pengadilan mengajukan kepada Presiden agar Pejabat tersebut melaksanakan Putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Atas perintah KPTUN, Panitera mengirimkan surat tercatat kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat yang dapat pula ditembuskan kepada semua atasan dari Badan/Pejabat TUN yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan.



11. Apabila tergugat sudah melaksanakan Putusan Pengadilan. Tergugat bisa mengupload dokumen dengan melampirkan keterangan bahwa tergugat sudah melaksanakan eksekusi pada menu laporan eksekusi tergugat. Pengadilan akan memverifikasi laporan eksekusi. Apabila laporan dinyatakan valid oleh pengadilan maka proses pelaksanaan Putusan dinyatakan sudah selesai oleh Pengadilan.



#### 4. Aplikasi E-Case Files V2 (Arsip perkara elektronik)

Aplikasi E-Case Files merupakan Inovasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam bidang tata kelola Arsip yang dimulai dengan Digitalisasi arsip perkara yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai backup. Dengan e-casefile versi 2 ini pengguna dapat melihat (preview) dokumen perkara tanpa harus mendownload untuk kepentingan peminjaman dokumen untuk serta riwayat pengguna untuk keamanan arsip perkara.

Dengan aplikasi e-casefile Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bisa mencegah kehilangan dokumen persidangan atau kerusakan dokumen dikarenakan termakan usia. Dengan menggunakan web base aplikasi mudah di gunakan untuk pencarian data. Aplikasi ini Aplikasi e-case files ini dikembang untuk kepentingan internal saja.

eCase File

Dashboard Arsip Penetapan Pengambilan Salinan System

Stasikan gubahan hasil tabel ditatahase di bawah ini untuk melakukan navigasi atau filter hasil pencarian.

Tempelkan: 15

NO.	NOMOR PERKARA & TANGGAL REGISTRER	KLARIFIKASI PERKARA	PARA PIHAK	STATUS PERKARA
1	80/2025/PTUN.JKT Tanggal Register : Jumat, 10 Januari 2025	Badan Hakim	Pengggugat: Rina Lucevibe Seduasta Tergugat: Konsentrikam	Penetapan
2	70/2025/PTUN.JKT Tanggal Register : Rabu, 09 Januari 2025	Lain Lain	Pengggugat: 1.RACHMA FITRATI, S.Sos., MS 2.MAHMAD JUFRI SADI 3.NOVYATI 4.MIRANTI QUTUBA SUBAHTOJA, M.S.C 5.SYOFIA NELLI 6.AGUS SUDH PRASETYO 7.HER BABUKI, S.KP., S.Kes. 8.CHANDI LORING 9.SUSANAWATI, S.Pd M. Kes 10.DSA. SRI SILVYANI, APD 11.MELDA RETNA WENINGSIH Tergugat: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	Penetapan
3	80/2025/PTUN.JKT Tanggal Register : Rabu, 09 Januari 2025	Lain Lain	Pengggugat: PT MANGLO INDONESIA SERVICETAMA Tergugat: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	Penetapan
4	80/2025/PTUN.JKT Tanggal Register : Selasa, 07 Januari 2025	Perubahan	Pengggugat: R. Lili En Al Abang Tergugat: Korpsi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta	Penetapan

eCase File

Dashboard Arsip Penetapan Pengambilan Salinan System

Detail Arsip

Beranda > Arsip > Detail Arsip

Data Umum **Perkara Penetapan** Arsip Penetapan Penetapan

### Perkara Penetapan

Nomor Perkara : 293/G/2024/PTUN.JKT

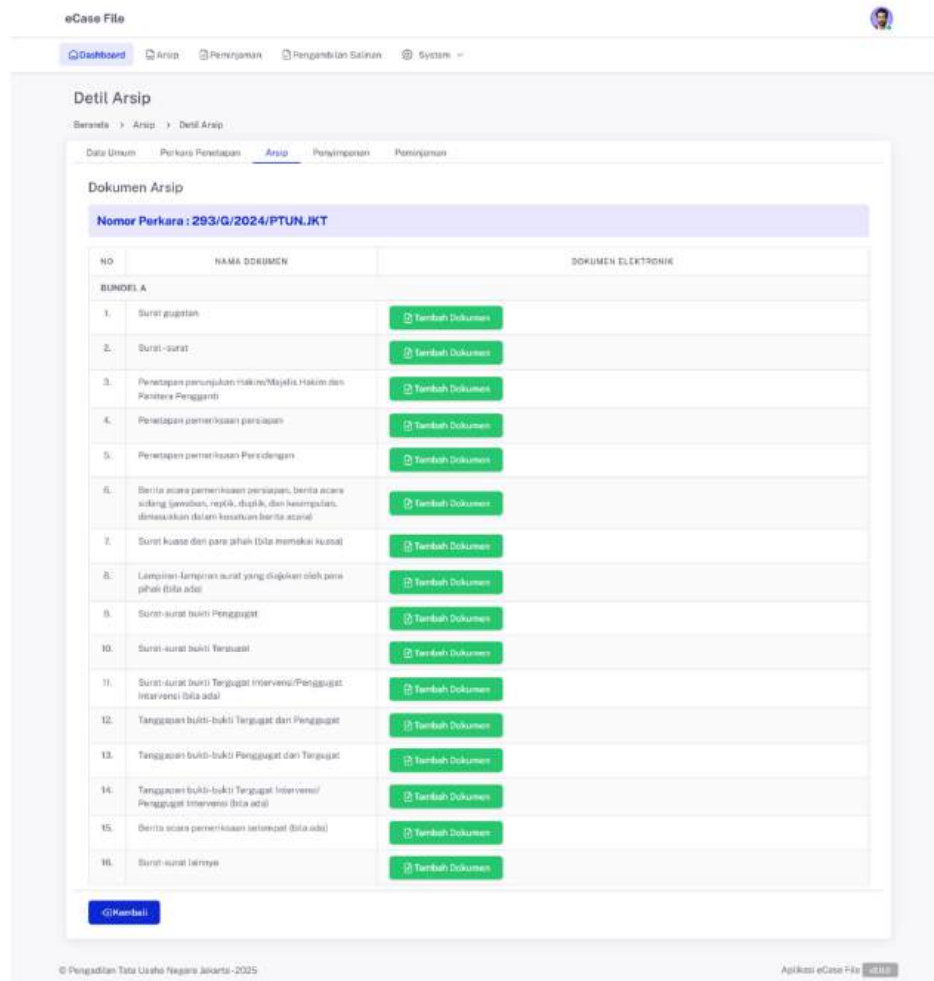
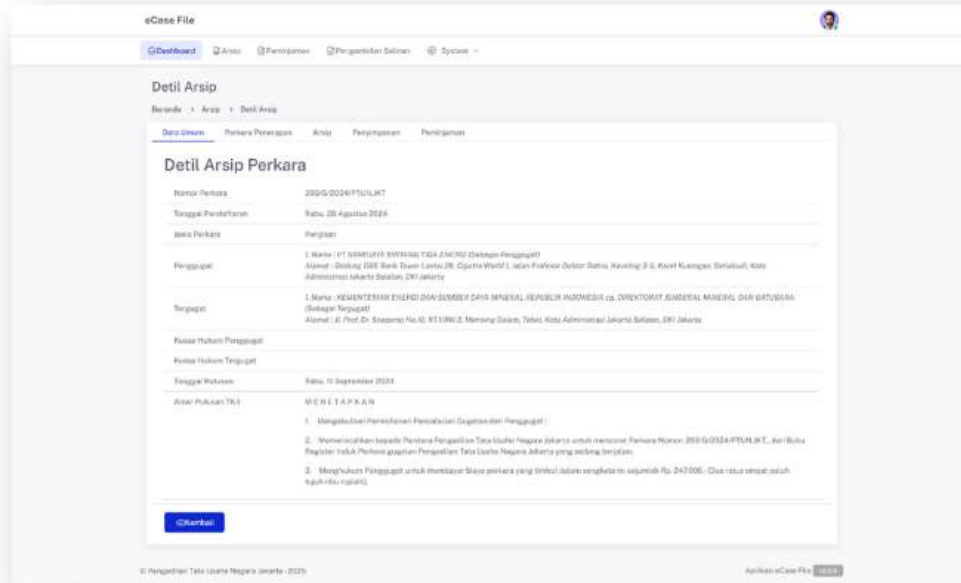
Hakim/Majelis Hakim

TANGGAL PENETAPAN	NAMA HAKIM/MAJELIS HAKIM	JENIS ACARA
Rabu, 28 Agustus 2024	Hakim Ketua: FERRINA PERMADI, S.H Hakim Anggota 1: LUCIA PERMATA SARU, S.H., M.HUM Hakim Anggota 2: MOKHAMMAD HERIFFY INDRAGAN R., S.Sos., S.H., M.H.	Acara biasa

Panitera/Panitera Pengganti

TANGGAL PERUBAHAN	NAMA PANITERA/PANITERA PENGGANTI
Rabu, 28 Agustus 2024	Panitera Pengganti: Diah Kurnata Desai, S.H., M.H.

[Kembali](#)



## BAB VI PENGAWASAN

### A. INTERNAL

Pengawasan dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku baik berupa peraturan perundang-undangan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan sebagainya antara lain :

- a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMN006/SK/II/1994 dan Juklak tentang Tata Cara Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 1993 tanggal 11 Mei 1993 tentang Pembinaan Personil dan Kepemimpinan Pengadilan.
- c. Surat Ketua MARI Nomor : MA/KUMDIL/207//III/K/1994 tanggal 1 Agustus 1994 yang menginstruksikan penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang (di Pengadilan Tingkat Banding) dan penunjukan Hakim Pengawas Bidang (di Pengadilan Tingkat Pertama).
- d. Keputusan Ketua MARI Nomor : KMN080/SK/VI 11/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan tanggal 24 Agustus 2006.
- e. Keputusan Sekretaris MARI Nomor : 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
- f. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 3522/KPTUN.W2.TUN.1/PW1.1.1/XI/2024 tanggal 22 Nopember 2024 tentang Penunjukan Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Pengawasan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan meliputi :

1. Pelaksanaan Tugas Pokok di Lingkungan Kepaniteraan yang mencakup Administrasi persidangan dan Administrasi perkara.
2. Pelaksanaan Tugas Pokok dilingkungan kesekretariatan mencakup administrasi kepegawaian. Keuangan, inventaris, pelaporan, IT, dan administrasi lainnya.
3. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang.
4. Penunjukan Hakim Pengawas Bidang bagi Sub Kepaniteraan Hukum Perkara, Sub Kepaniteraan Hukum, Sub Bag Umum dan Keuangan, Sub Bag Kepegawaian dan Ortala, serta Sub Bag Perencanaan , TI dan Pelaporan (PTIP).
5. Pengawasan berkala berupa permintaan laporan bulanan kepada masing-masing sub bagian oleh Hakim Pengawas Bidang disertai tindak lanjut hasil pengawasan.
6. Hasil pengawasan dilaporkan oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 1 (Satu) Bulan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Koordinator Hakim Pengawas Bidang.

**SK KOORDINATOR DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG TAHUN 2024**



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**NOMOR : 3522 /KPTUN.W2.TUN.1/PW1.1.1/XI/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG  
KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa guna melaksanakan tugas dan kewenangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta baik di bidang teknis administrasi peradilan (Kepaniteraan) maupun di bidang teknis administrasi Umum (Keseekretariatan), maka perlu ditunjuk Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang;
  - b. Bahwa oleh karena adanya Hakim yang Promosi dan Mutasi maka dipandang perlu untuk melakukan pergantian personel Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang;
  - c. Bahwa Hakim yang namanya ditunjuk dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan;
  - 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
  - 5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Keseekretariatan Peradilan;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA;

**KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 2253/KPTUN.W2.TUN.1/PW1.1.1/VIII/2024 Tentang Penunjukan Koordinator Dan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Keseekretariatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

- KEDUA : Menunjuk Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Hakim Pengawas Bidang bertugas melakukan semua pengawasan sesuai Tupoksi bidang tersebut, dan juga memberikan bimbingan dan petunjuk yang diperlukan kepada para Pejabat Struktural dan Fungsional serta petugas-petugas terkait lainnya sesuai Tupoksi masing-masing;
- KEEMPAT : Hakim Pengawas Bidang melaksanakan tugas pengawasan **setiap bulan** dengan penuh tanggung jawab dan melaporkannya setiap tanggal 5 pada bulan tersebut secara reguler dan tertulis kepada Koordinator Hakim Pengawas Bidang;
- KELIMA : Koordinator Hakim Pengawas Bidang bertugas memberi bimbingan dan petunjuk yang diperlukan kepada para Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan Tupoksi masing-masing, juga membuat laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan para Hakim Pengawas Bidang;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;
- SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada para Hakim yang ditunjuk untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 22 November 2024.



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA,**

**OENOEN PRATIWI**

DAFTAR NAMA KOORDINATOR DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG  
KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN  
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NO	NAMA	JABATAN DINAS	DITUNJUK SEBAGAI
1	YARWAN, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	KOORDINATOR HAKIM PENGAWAS BIDANG
<b>I. HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN</b>			
1	LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum	HAKIM	SURAT KUASA
2	HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.	HAKIM	BERKAS IN AKTIF
3	HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.	HAKIM	KEUANGAN PERKARA
4	Dr.NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.	HAKIM	BUKU REGISTER
5	RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.	HAKIM	LAPORAN PERKARA
6	FILDY, S.H., M.H.	HAKIM	INFORMASI DAN PENGADUAN, WBS, GRATIFIKASI, SERTA BENTURAN KEPENTINGAN
7	DIKDIK SOMANTRI, S.H., M.H.	HAKIM	PENINJAUAN KEMBALI
8	HARISTOV ASZADHA, S.H.	HAKIM	POSBAKUM
9	GANDA KURNIAWAN, S.H.	HAKIM	PERKARA BANDING
10	IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.	HAKIM	EKSEKUSI
11	MOHAMMAD HERRY INDRAWAN PATIRADJA, S.Sos., S.H., M.H.	HAKIM	SIPP
12	GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.	HAKIM	PERKARA KASASI
13	FEBRINA PERMADI, S.H., M.H.	HAKIM	PTSP
<b>II. HAKIM PENGAWAS BIDANG KESEKRETARIATAN</b>			
1	FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.	HAKIM	KEBERSIHAN
2	YUSTAN ABITHOYIB, S.H.	HAKIM	KEUANGAN
3	YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.	HAKIM	PERENCANAAN
4	ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.	HAKIM	PELAPORAN
5	ANDI FAHMI AZIS, S.H.	HAKIM	IT (WEBSITE)
6	DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.	HAKIM	KEAMANAN
7	NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, S.H., M.H.	HAKIM	PERPUSTAKAAN & PERSURATAN
8	ARIFUDDIN, S.H., M.H.	HAKIM	PERLENGKAPAN & INVENTARISIR
9	GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.	HAKIM	KEPEGAWAIAN & ORTALA

KETUA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA,



Pengawasan yang dimaksud untuk, memperoleh informasi apakah penyelenggara teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan program kerja dapat terlaksana sesuai rencana.

## B. EVALUASI

Dalam suatu Lembaga Pemerintah yang transparansi maka harus selalu diadakan evaluasi secara internal, baik di bagian kepaniteraan maupun dibagian kesekretariatan. Pelaksanaan tugas administrasi umum secara garis besar sudah berjalan baik dan tertib meskipun masih ada kekurangan, bahwa untuk meminimalisir temuan dan kekurangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Hakim Pengawas Bidang harus mengevaluasi masing-masing bidang atau bagian (Kepaniteraan dan Kesekretariatan) secara berkala, dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan persidangan secara elektronik (e-court) dan melakukan Inovasi dengan baik, hal itu harus lebih dikembangkan lagi, dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai dan Sumber Daya Manusia yang ada dimaksimalkan dengan baik.

## BAB VII PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk mendukung pemerintahan yang baik. Untuk itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan harapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan penyusunan laporan tahunan di tahun 2024 dengan harapan institusi lain dan masyarakat dapat lebih mengetahui berbagai persoalan kinerja dan kendala yang dihadapi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sangat kompleks di lapangan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melaksanakan kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung meliputi implementasi program unggulan yaitu SIPP, layanan PTSP, proses perkara secara elektronik (E-Court), kepatuhan terhadap LHKPN dan Mendukung Pembangunan Zona Integritas. Meskipun tugas administrasi perkara dan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah berjalan dengan baik dan tertib namun secara rutin pembinaan dan pengawasan tetap dilaksanakan untuk dapat meningkatkan prestasi kerja.

Prestasi yang telah dicapai saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Juara Pertama pada Kategori Inovasi Pelayanan Publik : Aplikasi Jak-Aksi (Aplikasi Eksekusi PTUN Jakarta), Juara Pertama pada Kategori Video Alur Penanganan Perkara di Pengadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berhasil meraih penghargaan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2024 dengan Predikat 'B' yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.

Dengan prestasi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan informasi dan pelayanan di Pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Telah mengoptimalkannya penggunaan system informasi teknologi informasi,, Portal Info Perkara dan saat ini telah di kembangkan Aplikasi yang bernama *Aplikasi SI PITUNG versi 3 (Sistim Pelayanan Informasi Terpadu Unggulan)*, *New e-visitor versi 2 (Buku Tamu)*, *Aplikasi Jak-Aksi (Aplikasi Eksekusi )* dan *Aplikasi E-Case Files*. Dengan adanya inovasi tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bisa lebih memaksimalkan pelayanan kepada para pihak yang beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Visi dan Misi yakni terwujudnya Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan Dan Transparan Yang Berbasis Teknologi Informasi.

Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam hal memberikan pelayanan publik melalui Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berpredikat “Baik” dan sistem teknologi informasi, SIPP dan pelayanan dalam bentuk manual merupakan keberhasilan bersama seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sekalipun tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pelaksanaan realisasi anggarannya dioptimalkan sebagai upaya peningkatan produktifitas kinerja yang meliputi bidang kesekretariatan dan kepaniteraan. Penggunaan anggaran untuk biaya-biaya/belanja pegawai, barang dan modal semakin efektif dan efisien, tepat cara dan sasaran.

## B. REKOMENDASI

Pada akhir laporan ini, kami sampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan SDM ( Sumber Daya Manusia ) untuk mengisi bagian-bagian di sekretariat yang banyak di isi oleh PPNPN ;
2. Perlu adanya penambahan kendaraan dinas roda 4 bagi pimpinan ;
3. Perlu adanya penambahan Biaya untuk renovasi pembangunan rumah dinas Ketua, Wakil ketua dan Hakim yang saat ini dalam koondisi rusak berat dan tidak layak untuk di tempati;
4. Perlu adanya peremajaan alat bantu kerja seperti PC, Laptop, printer dan scanner dalam menunjang teknologi informasi;
5. Perlu adanya penambahan tenaga outsourcing untuk kebersihan, keamanan, dan supir pimpinan apabila PPNPN di angkat menjadi P3K ;
6. Perlu Penambahan tenaga pegawai untuk pekerjaan yang memerlukan teknis tertentu antara lain analis perencanaan, analis pelaporan, dan Pranata komputer.

Dengan adanya penambahan pegawai serta peningkatan kualitas sarana dan prasana dapat lebih menunjang penyelesaian tugas dan fungsi PTUN Jakarta menjadi lebih optimal.